



PENGARUH *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY* (ICT), PERSEPSI KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN *TRADE OPENNESS* TERHADAP *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DI ASEAN

SKRIPSI

Oleh:

**Nailul Farih
NIM 160810101143**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



PENGARUH *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY* (ICT), PERSEPSI KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *TRADE OPENNESS* TERHADAP *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DI ASEAN

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Nailul Farih
NIM 160810101143**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Abdul Wahid dan Ibu Karimunah tercinta yang senantiasa tulus mendo'akan ananda dalam setiap perjalanan menempuh pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Perguruan Tinggi, memberikan dorongan, kasih dan sayang yang tak terhingga sehingga saya selalu semangat dalam menatap masa depan dan menggapai cita-cita, serta seluruh pengorbanan yang tak terhingga;
2. Saudara-saudara kandung saya yang senantiasa memberikan support baik moril maupun materil sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga kita senantiasa bisa membahagiakan kedua orang tua kita;
3. Bapak ibu guru sejak Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah memberikan bekal ilmu dan moral;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

-Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*

“*Man Jadda Wajada*”

(barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil)

-Ahmad Fuadi

“Dzikir, Fikir dan Amal Soleh”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailul Farih

NIM : 160810101143

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh *Information and Communication Technology* (ICT), Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2020

Yang Menyatakan,

Nailul Farih

NIM. 160810101143

SKRIPSI

PENGARUH *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY* (ICT), PERSEPSI KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *TRADE OPENNESS* TERHADAP *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DI ASEAN

Oleh :

Nailul Farih

NIM. 160810101143

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing II : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh *Information and Communication Technology* (ICT), Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN

Nama Mahasiswa : Nailul Farih

NIM : 160810101143

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 28 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Regina Niken Wilantari., S.E., M.Si.
NIP. 197409132001122001

Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.
NIP. 198103302005011003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 19720713 199903 1 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

PENGARUH *INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY* (ICT), PERSEPSI KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *TRADE OPENNESS* TERHADAP *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DI ASEAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nailul Farih
NIM : 160810101143
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal:

02 Juli 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Dra. Sebastiana V, M.Kes. (.....)
NIP. 196411081989022001
2. Sekretaris : Dr. Riniati, M.P. (.....)
NIP. 196004301986032001
3. Anggota : Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 197106102001122002



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Pengaruh *Information and Communication Technology* (ICT), Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN

Nailul Faridh

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Persoalan pembiayaan adalah masalah yang sering dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Keterbatasan modal yang dimiliki sebuah negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Aliran modal asing berupa FDI dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. FDI dapat dijadikan sektor pendorong potensial dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, disamping transfer teknologi dan skill. Masuknya FDI ke suatu negara tidak terlepas dari adanya faktor kemajuan teknologi, kondisi sosial ekonomi dan kondisi makro ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ICT, Persepsi Korupsi Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* terhadap aliran masuk FDI ke ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura). Penelitian ini menggunakan analisis *Regresi Data Panel* dengan pendekatan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ICT berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan variabel Persepsi Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *Trade Openness* berpengaruh positif dan signifikan..

Kata Kunci: FDI, ICT, Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, *Trade Openness*, PLS

The Effects of Information and Communication Technology (ICT), Corruption Perception, Economic Growth and Trade Openness on Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN

Nailul Farih

Department of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

The problem of financing is a problem that is often faced in the process of economic development of a country. Limited capital owned by a country can hamper economic growth. The flow of foreign capital in the form of FDI can be used as a solution in solving the problem. FDI can be a potential driving sector in carrying out economic development, in addition to the transfer of technology and skills. The entry of FDI into a country is inseparable from the factors of technological progress, socioeconomic conditions and macroeconomic conditions of a country. This study aims to determine the effect of ICT, Corruption Perception, Economic Growth and Trade Openness on FDI inflows to ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, the Philippines and Singapore). This research uses Panel Data Regression analysis with Random Effect Model approach. The results showed that the ICT, variable had a positive and not significant effect. While the Corruption Perception, the Economic Growth and Trade Openness variable had a positive and significant effect result.

Keywords: FDI, ICT, Corruption Perception, Economic Growth and Trade Openness, PLS

RINGKASAN

Pengaruh *Information and Communication Technology* (ICT), Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN; Nailul Farih; 160810101143; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Persoalan pembiayaan adalah masalah yang sering dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Keterbatasan modal yang dimiliki sebuah negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal atau investasi dapat dijadikan sebagai solusi sumber pembiayaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Investasi terdiri dari dua jenis. Pertama, Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, investasi yang dilakukan oleh swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi luar negeri yang masuk dalam suatu negara terdiri dari dua macam, yaitu Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Investasi portofolio. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa FDI memberikan dampak yang lebih signifikan. Karena selain memberikan investasi berupa modal, FDI juga memberikan transfer teknologi dan skill. Selain itu, di Era Perdagangan Bebas, di negara yang maju seperti Amerika saja, FDI tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang, FDI sangat dibutuhkan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.

ASEAN (*Association of South East Asia Nation*) merupakan organisasi negara-negara yang berada di wilayah Regional Asia Tenggara. ASEAN merupakan kawasan yang terkenal kaya akan sumberdaya alam dan manusia. Kawasan tersebut juga tercatat sebagai salah satu kawasan di dunia yang mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari derasnya arus FDI yang masuk ke negara kawasan ASEAN.

Kawasan ASEAN merupakan kekuatan ekonomi baru dunia dengan anggota negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara terdiri dari sepuluh negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Myanmar, Laos dan Brunei Darussalam. Dengan dijalankannya kebijakan integrasi ekonomi antar negara di kawasan ASEAN atau yang dikenal dengan istilah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN berada pada enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura. Negara-negara tersebut disebut sebagai negara terbesar di Asia Tenggara.

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, beberapa ahli kurang memperhitungkan aspek peranan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*). Peranan ICT terhadap FDI telah mengubah model bisnis perusahaan maupun individu. Para pemangku kebijakan saat ini menyadari bahwa ICT memegang peranan vital terhadap arus FDI dan hampir seluruh bidang lainnya. Kondisi Sosial Ekonomi suatu negara juga menjadi pertimbangan khusus bagi investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Korupsi merupakan fenomena sosial ekonomi yang menjadi perhatian investor dan pemerintah dari berbagai negara dalam 20 tahun terakhir. Biaya yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan biaya tinggi (*high cost economy*) dan menggerogoti daya saing investasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam memutuskan menanamkan FDI. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara diukur dengan menggunakan nilai *Gross Domestic Product* (GDP). Jika nilai GDP suatu negara tinggi, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas perekonomian negara tersebut berjalan dengan baik dan cenderung stabil. Hal itulah yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya. Faktor lain yang tak kalah penting dalam menentukan masuknya FDI ke dalam suatu negara adalah *Trade Openness* atau keterbukaan perdagangan. Definisi dari trade openness adalah rasio dari nilai ekspor ditambah dengan impor per GDP (*Gross Domestic Product*) yang merupakan indikator derajat hubungan perekonomian suatu negara terhadap negara lainnya. Secara teori, trade openness

dapat memberikan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat. Keuntungan tersebut bisa berupa pembukaan akses pasar yang lebih luas, peningkatan tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Selain itu, dengan *trade openness* memungkinkan adanya modal yang mengalir dari luar negeri yang berwujud FDI (Purwanto, 2011).

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel ICT, Persepsi Korupsi Pertumbuhan Ekonomi dan Trade Openness terhadap aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN. Metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menggunakan Metode Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Random Effect Model*.

Berdasarkan analisis data kuantitatif menunjukkan hasil bahwa variabel ICT berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan variabel persepsi korupsi pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* berpengaruh positif dan signifikan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hadayah-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jaman jahiliah menuju jaman yang Ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh ICT, Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN” . Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya mulai dari semester pertama sampai semester akhir untuk senantiasa membimbing, memberi arahan, kritik dan saran dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran sehingga saya dapat menjalankan studi serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember;
5. Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

7. Kedua orangtua saya tercinta Bapak Abdul Wahid dan Ibu Karimunah yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan baik moral maupun material dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan pengorbananyang tak terhingga;
8. Rekan-rekan konsentrasi Regional angkatan 2016 yang selalu kompak dan saling mendukung;
9. Teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2016, terimakasih atas sharing ilmu dan diskusi selama berada di bangku kuliah
10. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJIE) periode 2018. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang dibangun, kerjasama, komitmen, serta dedikasi yang luar biasa sehingga kita mampu melewati satu periode kepengurusan dengan baik dan cukup berkesan sehingga menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
11. Sahabat-sahabati "Rumah Biru" khususnya angkatan 2016, terimakasih telah menjadi keluarga kedua saya selama menjalani studi di Jember.
12. Rekan-rekan KKN 14 Periode II Tahun 2019 Universitas Jember, terimakasih atas pengalaman yang berharga selama 45 hari menjalani KKN di Desa Petung, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, artinya ntidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi yang penulis susun. Penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan.

Jember, 27 Mei 2019

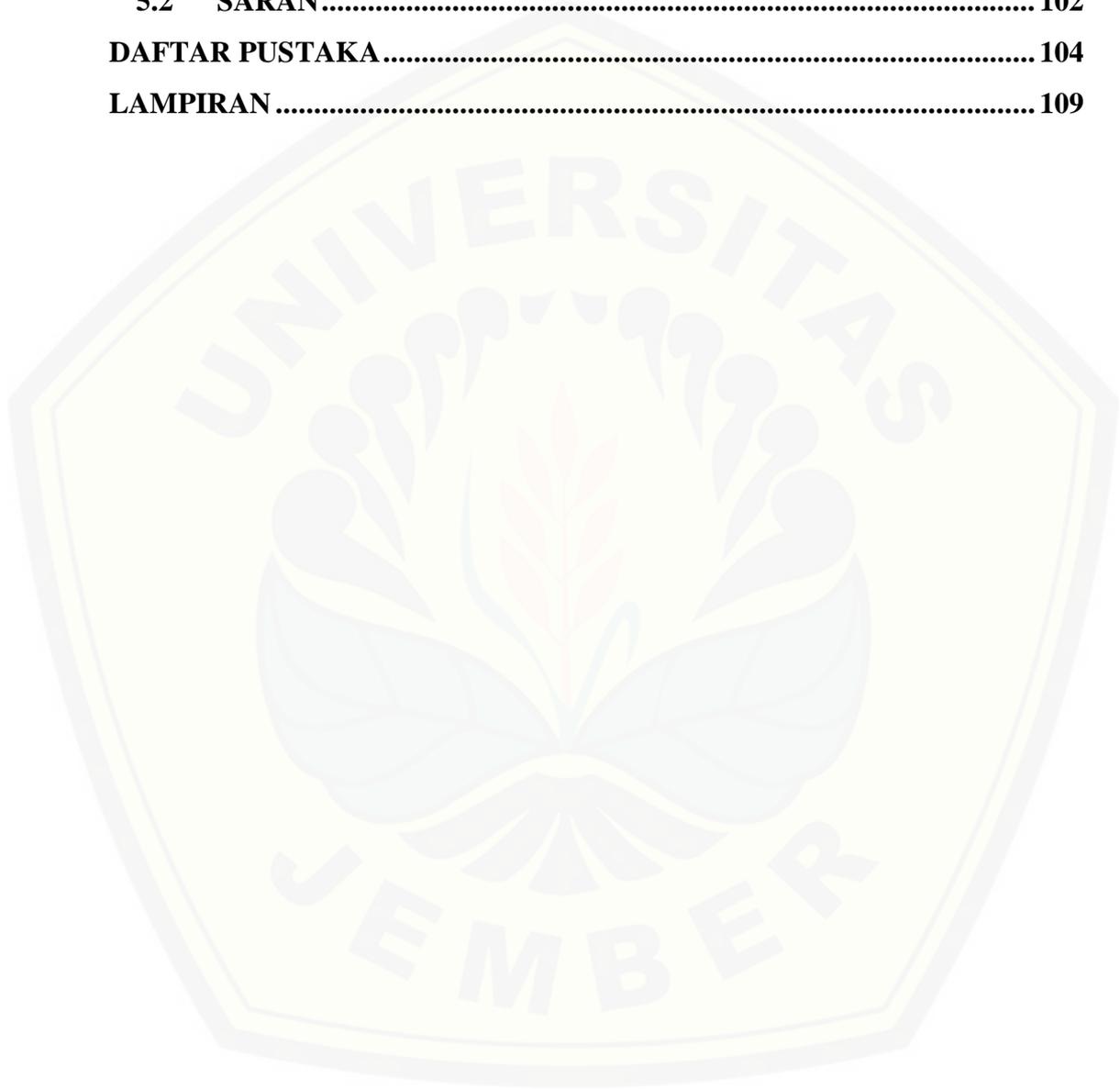
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Investasi Asing Langsung/ FDI (<i>Foreign Direct Investment</i>)	14
2.1.2 Teori Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)	21
2.1.3 Teori Korupsi	23
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.5 Teori Trade Openness	34
2.2 Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen	36

2.2.1	Hubungan Perkembangan Teknologi dan <i>Foreign Direct Investment</i>	36
2.2.2	Hubungan Persepsi Korupsi dan <i>Foreign Direct Investment</i>	38
2.2.3	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Foreign Direct Investment</i>	39
2.2.4	Hubungan Trade Openness dan <i>Foreign Direct Investment</i>	39
1.1	Penelitian Terdahulu	40
1.2	Kerangka Konsep	48
1.3	Hipotesis	50
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	51
3.2	Jenis Penelitian	51
3.3	Metode Penentuan Populasi dan Sampel	52
3.4	Metode Pengumpulan Data	52
3.5	Desain Penelitian	53
3.6	Spesifikasi Model Penelitian	54
3.7	Definisi Operasional Variabel	62
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1	Gambaran umum Objek Penelitian	65
5.1.1	Perkembangan <i>Foreign Direct Investment</i> di ASEAN	65
5.1.2	Gambaran Umum Kondisi Makroekonomi ASEAN	67
5.2	Hasil Analisis	78
5.2.1	Analisis Hasil Estimasi dengan Data Panel	78
5.2.2	Model Terbaik Data Panel: Random Effect Model (REM)	81
5.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	87
5.3	Pembahasan	90
5.3.1	Pengaruh Information and Communication Technology (ICT) terhadap <i>Foreign Direct Investment</i> di ASEAN	90
5.3.2	Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap <i>Foreign Direct Investment</i> di ASEAN	92
5.3.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap <i>Foreign Direct Investment</i> di ASEAN	93

5.3.4	Pengaruh Trade Openness terhadap Foreign Direct Investment di ASEAN	94
BAB 5	PENUTUP	101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	SARAN.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	104
	LAMPIRAN	109



DAFTAR TABEL

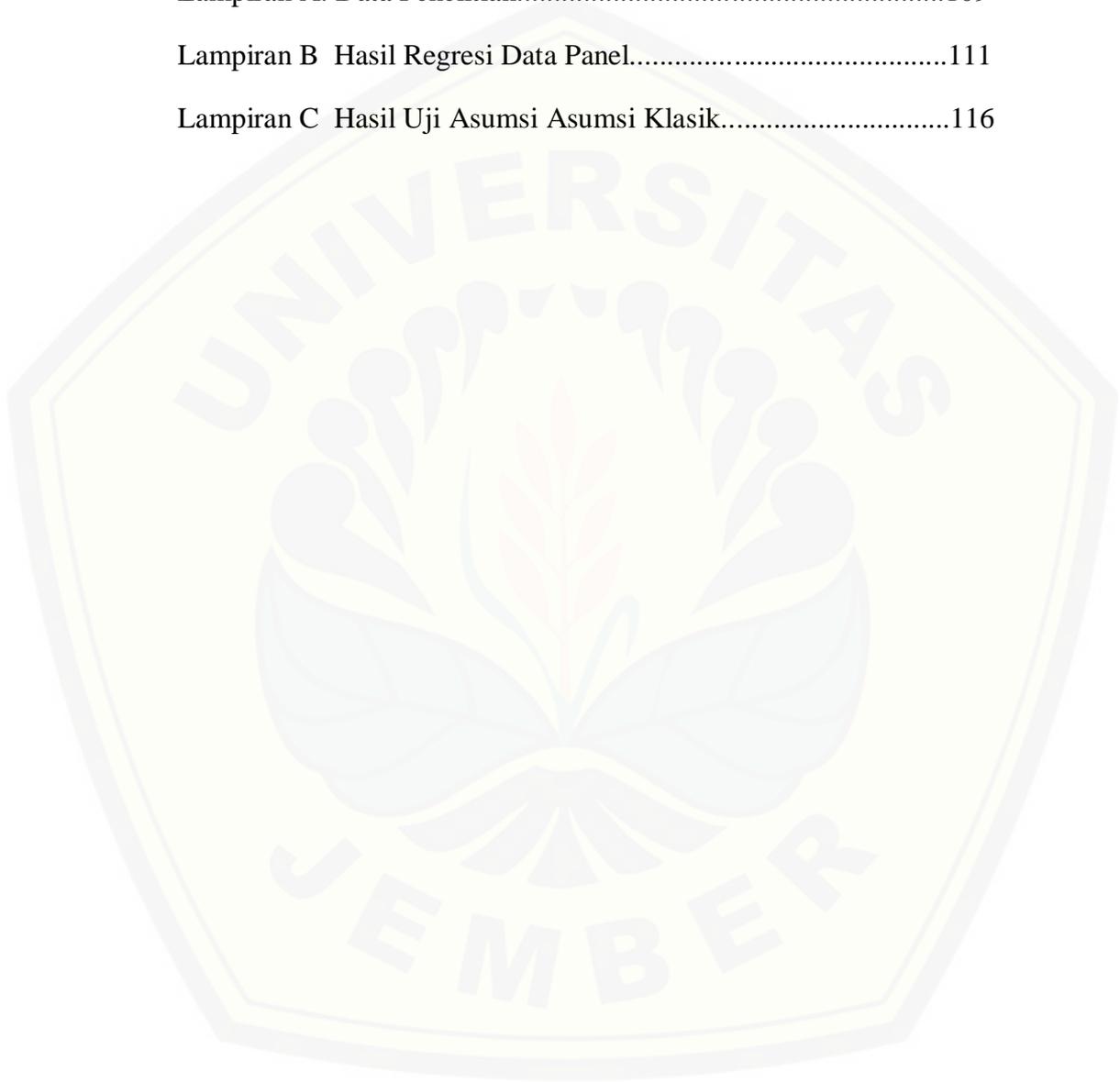
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 4.1 Perbandingan Estimasi dengan Panel Data.....	79
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	80
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	81
Tabel 4.4 Uji Random Effect Model.....	81
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Cross Section Random Effect.....	83
Tabel 4.6 Hasil Uji T-statistik.....	84
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4.8 Hasil Uji R ²	87
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	88
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Foreign Direct Investment (FDI) dalam Billion US\$ di ASEAN Tahun	03
Gambar 1.2.	Perkembangan Presentase pengguna internet di ASEAN	05
Gambar 1.3.	Skor Corruption Perception Index di ASEAN.....	07
Gambar 1.4.	Nilai GDP di ASEAN dalam Billion US\$ Dollars.....	08
Gambar 1.5.	Nilai Trade Openness di ASEAN.....	10
Gambar 2.1.	Fungsi Produksi Harrod-Domar.....	31
Gambar 2.2.	Kerangka Konseptual.....	49
Gambar 4.1.	Perkembangan Foreign Direct Investment (FDI).....	66
Gambar 4.2.	Perkembangan ICT, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	67
Gambar 4.3.	Perkembangan ICT, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Malaysia	69
Gambar 4.4.	Perkembangan ICT, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Thailand.....	71
Gambar 4.5.	Perkembangan ICT, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Vietnam.....	73
Gambar 4.6.	Perkembangan ICT, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Filipina.....	75
Gambar 4.7.	Perkembangan ICT, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Singapura.....	77
Gambar 4.8.	Hasil Uji Normalitas.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Data Penelitian.....	109
Lampiran B Hasil Regresi Data Panel.....	111
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Asumsi Klasik.....	116



DAFTAR SINGKATAN



FDI	: Foreign Direct Investment
ICT	: Information and Communication Technology
OECD	: Organisasi For Economic Co-operation And Development
TI	: Transparency Internasional
ITU	: International Telecommunication Union
UN	: United Nations
CPI	: Corruption Perception Index
UNCTAD	: United Nations Conference on Trade and Development
REM	: Random Effect Model
PLS	: Panel Least Square
FEM	: Fixed Effect Model
BLUE	: Best Linear Unbias Estimator

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan pembiayaan adalah masalah yang sering dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Keterbatasan modal yang dimiliki sebuah negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal atau investasi dapat dijadikan sebagai solusi sumber pembiayaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Thirafi, 2013).

Harrod-Domar menekankan pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar. (Sadono, 2007).

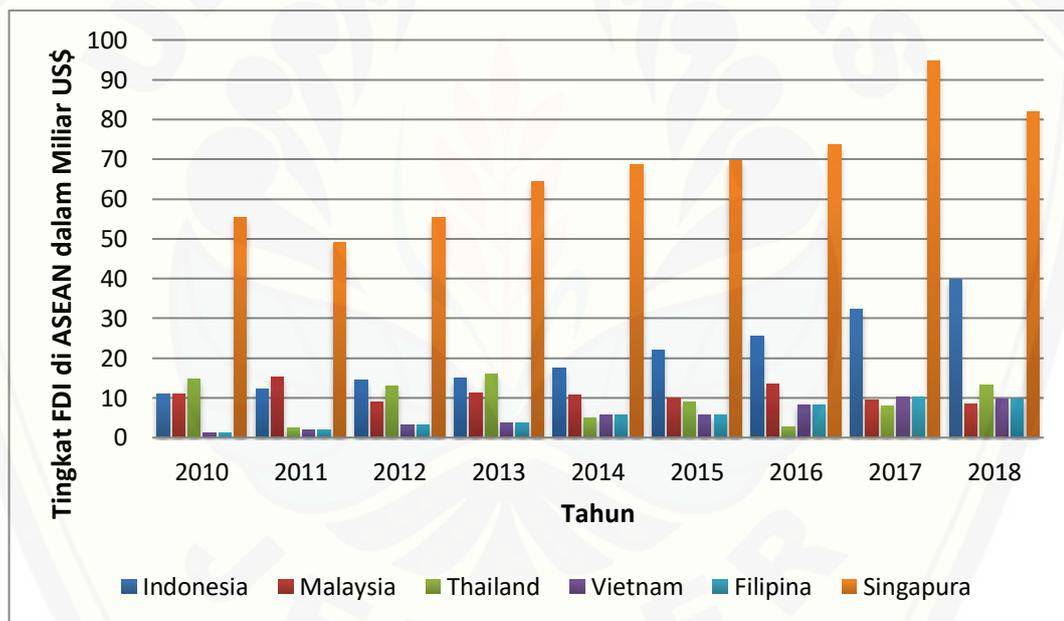
Investasi terdiri dari dua jenis. Pertama, Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, investasi yang dilakukan oleh swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi luar negeri yang masuk dalam suatu negara terdiri dari dua macam, yaitu Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Investasi portofolio. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa FDI memberikan dampak yang lebih signifikan. Karena selain memberikan investasi berupa modal, FDI juga memberikan transfer teknologi dan skill. Selain itu, di Era Perdagangan Bebas, di negara yang maju seperti Amerika saja, FDI tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara kawasan ASEAN, FDI sangat dibutuhkan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik investor asing untuk menanamkan modalnya (Winantyo, 2008).

ASEAN (*Association of South East Asia Nation*) merupakan organisasi negara-negara yang berada di wilayah Regional Asia Tenggara. Dimana negara-negara yang tergabung didalamnya mayoritas tergolong sebagai negara-negara yang berkembang. Negara-negara tersebut terus berusaha untuk meningkatkan keterbukaan ekonominya, selain itu, ASEAN juga sedang menunjukkan peningkatan pada sektor industrinya yang dapat menarik perhatian investor asing untuk menanamkan FDI.

Secara umum bisa dikatakan bahwa iklim investasi yang ada di kawasan ASEAN semakin matang dan menggiurkan bagi investor asing. Tahun 1992 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV di Singapura, disepakati untuk dibentuk kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Area* (FTA) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan diversifikasi ke negara lain. ASEAN FTA (AFTA) merupakan bentuk kesepakatan dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA diwujudkan melalui kebijakan penurunan tarif hingga menyentuh 0 sampai 5 persen. Penghapusan pembatasan kuantitatif serta hambatan-hambatan non tarif lainnya. Selain itu juga terdapat kesepakatan yang terbentuk untuk menghapuskan semua bea impor.

Menurut Winantyo (2008), terbentuknya AFTA memberikan peluang lebih lancarnya mobilitas barang dan modal disertai penyelarasan langkah atau harmonisasi dalam pemberian intensifikasi investasi, tukar menukar informasi, penerbitan berbagai informasi, peluang investasi, dan promosi bersama ASEAN. Negara investor akan memilih sendiri negara yang paling menarik sebagai tempat investasi untuk masuk seluruh ASEAN. AFTA sudah diberlakukan secara penuh di sepuluh negara ASEAN. Struktur FDI negara maju dengan struktur FDI negara berkembang itu berbeda. Di negara maju seperti Singapura dilakukan dengan bertujuan untuk melakukan kegiatan penjualan, sedangkan untuk negara berkembang dilakukan dengan bertujuan untuk melakukan kegiatan produksi (Kurniati, *et al*, 2007).

Kawasan ASEAN merupakan kekuatan ekonomi baru dunia dengan anggota negara-negara yang berada di wilayah Asia tenggara terdiri dari sepuluh negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Myanmar, Laos dan Brunei Darussalam. ASEAN juga merupakan kawasan yang terkenal kaya akan sumberdaya alam dan manusia. Kawasan tersebut juga tercatat sebagai salah satu kawasan di dunia yang mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Setyadharma, 2017). Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari derasnya arus FDI yang masuk ke negara kawasan ASEAN (Akca, S, 2001). Kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN berada pada enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura. Negara-negara tersebut disebut sebagai negara terbesar di Asia Tenggara.



Gambar 1.1. Perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam Billion US\$ di ASEAN Tahun 2010 – 2018 (Sumber: World Bank, diolah)

FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura, hampir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terlebih dengan dijalankannya kesepakatan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015. Dimana kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal tanpa hambatan antar negara

ASEAN, menjadikan laju peningkatan FDI yang sangat signifikan seperti yang terlihat di gambar 1.1.

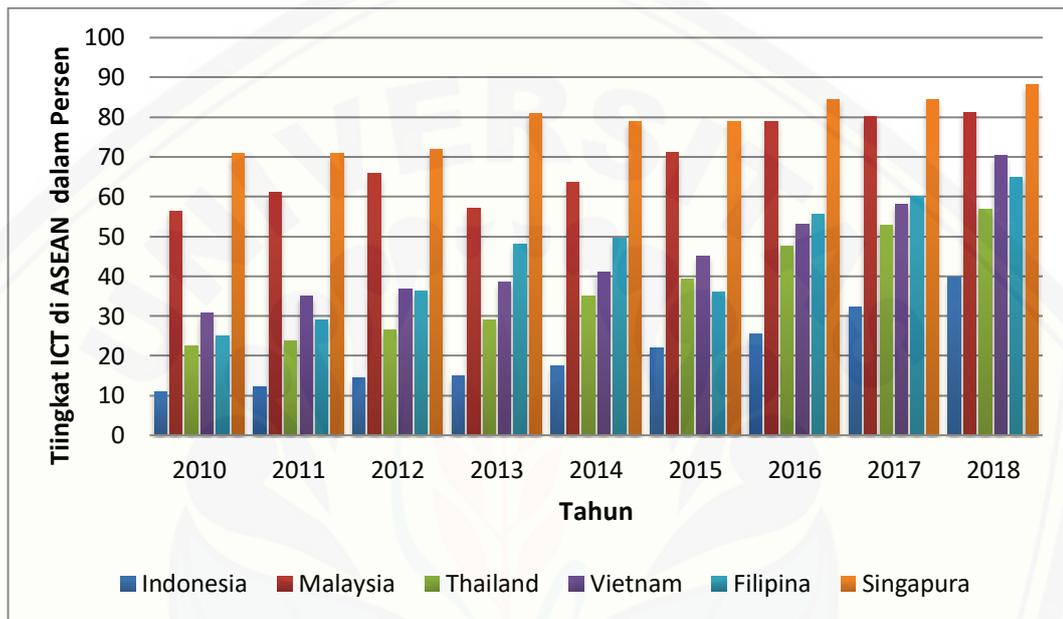
Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, beberapa ahli tidak memperhitungkan aspek peranan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*) merupakan seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2008).

Peranan ICT terhadap FDI telah mengubah model bisnis perusahaan maupun individu. Para pemangku kebijakan saat ini menyadari bahwa ICT memegang peranan vital terhadap arus FDI dan hampir seluruh bidang lainnya (Majlinda Axhiu dan Florida Veljanoska, 2013).

Di era Revolusi Industri 4.0, internet telah masuk kedalam hampir setiap sendi kehidupan manusia. Jika dulu internet hanya digunakan untuk mengakses data, informasi atau sekadar berselancar di media sosial, saat ini segala sesuatu bisa diakses melalui internet. Misalnya untuk berbelanja, pesan makanan, pesan kamar hotel, tiket moda transportasi, dan masih banyak lagi.

Menekan kesenjangan pengguna internet antara negara maju dan berkembang merupakan agenda bagi pembuat kebijakan, baik tingkat nasional maupun internasional. Seperti yang ditunjukkan Gambar 1.3 dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna internet di negara maju dengan negara berkembang pada investasi yang terdapat pada sektor ICT. Misalnya antara Singapura dengan Indonesia. Tahun 2018, pengguna internet di Singapura sebesar 88,16% dari total populasi penduduknya, sedangkan Indonesia hanya sebesar 39,78%. Beberapa organisasi internasional seperti *World Bank*, *International Telecommunication Union*, dan UNCTAD memberikan batasan perbedaan

kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur digital dapat mendorong peningkatan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan ICT dinilai mampu mengurangi biaya transaksi, memudahkan interaksi dalam berbisnis, serta mampu memfasilitasi bisnis-bisnis kecil atau UMKM di negara berkembang.



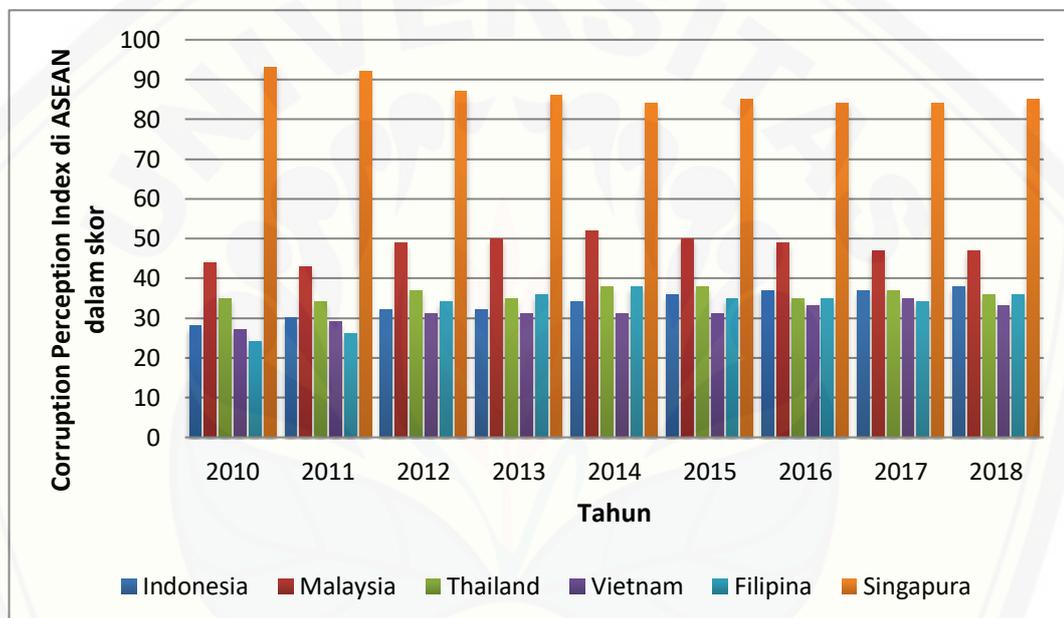
Gambar 1.2. Perkembangan Presentase pengguna internet di ASEAN tahun 2010 – 2018 (Sumber: *World Bank*, diolah)

Tony Addison dan Almas Heshmati (2003) dalam jurnalnya, “*The New Global Determinants of FDI Flow*” menjelaskan bahwa investasi asing langsung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, distribusi FDI yang sangat tidak setara dan sangat bertolak belakang bagi negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan untuk bersaing dengan negara maju. Maka penelitian tersebut adalah untuk menginvestigasi faktor-faktor penentu arus masuk FDI ke negara berkembang dengan menekankan pada dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Karena perkembangan ICT merupakan variabel yang harus mulai diperhitungkan dalam menentukan arus FDI. Hasil dari penelitian ini adalah ICT memiliki peran penting dalam memperlancar arus FDI serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Kondisi Sosial Ekonomi suatu negara juga menjadi pertimbangan khusus bagi investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Korupsi merupakan fenomena sosial ekonomi yang menjadi perhatian investor dan pemerintah dari berbagai negara dalam 20 tahun terakhir. Biaya yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan biaya tinggi (*high cost economy*) dan menggerogoti daya saing investasi. Pemerintah di negara-negara ASEAN perlu memberikan perhatian khusus dalam menangani masalah korupsi agar investor asing tertarik untuk berinvestasi. Beberapa negara ASEAN telah memiliki lembaga khusus serta independen untuk menangani korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Namun, data menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki skor *Corruption Perception Index* (CPI) yang rendah, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di ASEAN masih tergolong tinggi. *ASEAN Business Outlook Survey 2015* menuturkan bahwa korupsi secara konsisten menjadi topik yang sering dibahas dalam berita selama bertahun-tahun serta menjadi tantangan utama yang paling signifikan dalam melakukan bisnis ataupun investasi di ASEAN.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mendalami pengaruh korupsi terhadap *foreign direct investment* di suatu negara. Mauro (1997) menjelaskan Korupsi berpotensi mengurangi investasi, khususnya investasi Asing atau *Foreign Direct Investment*. Korupsi diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti birokrasi yang berlebihan, tingginya kebijaksanaan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, keterlambatan sistem hukum, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap aspek ekonomi, seperti investasi asing dan pertumbuhan ekonomi; dan telah menjadi perhatian untuk beberapa organisasi internasional seperti *World Bank*, *Transparency International*, *International Monetary Fund* (IMF) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Korupsi bukanlah suatu hal yang tidak biasa dalam bisnis internasional; melainkan sesuatu yang rutin dilakukan oleh para investor terutama di negara-negara berkembang (*Transparency International* (TI) Indeks Pembayar Suap, 2010; World Bank, 1999). Secara teoritis, korupsi dapat bertindak baik sebagai tangan menyambar (*grabbing hand*) dengan menaikkan biaya transaksi,

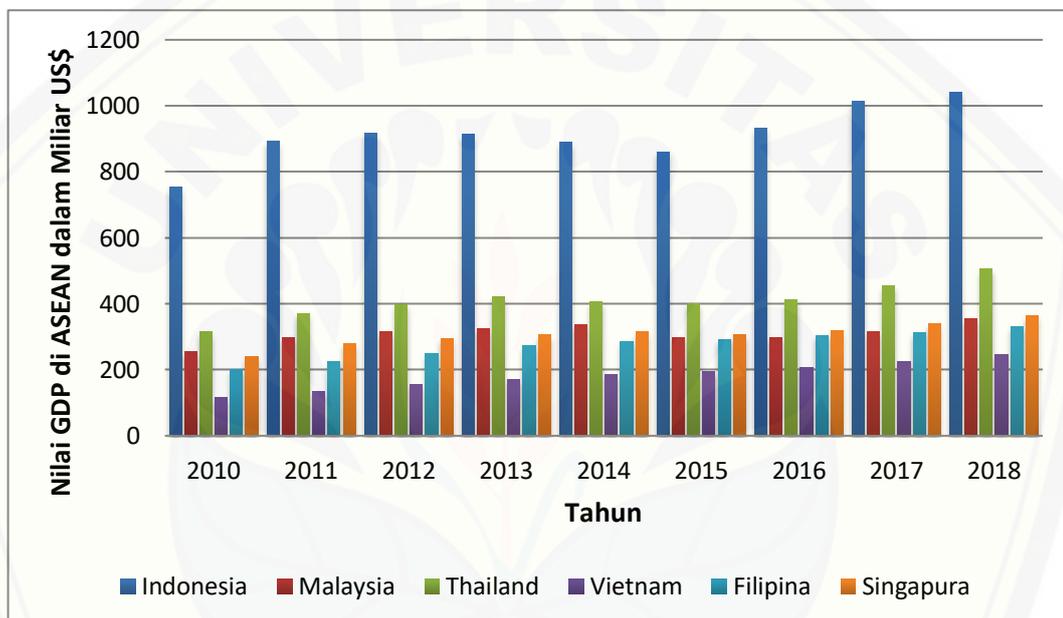
yang dapat menghambat investasi asing; atau tangan membantu (*helping hand*) dengan "menghaluskan" roda perdagangan di hadapan kerangka hukum dan peraturan yang berat. Hasil yang ditemukan dalam literatur empiris dapat digambarkan sebagai "campuran"; karena beberapa studi menemukan hasil yang mendukung hipotesis tangan menyambar (*grabbing hand*) yaitu korupsi mengurangi investasi asing. Sedangkan, beberapa penelitian lain menemukan hasil yang berlawanan yang mendukung hipotesis tangan membantu (*helping hand*), yaitu korupsi memfasilitasi investasi asing.



Gambar 1.3. Skor *Corruption Perception Index* di ASEAN Tahun 2010 – 2018
(Sumber : Transparency International, diolah)

Transparency International mengeluarkan *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skala 0 – 100, dimana semakin tinggi skor suatu negara maka semakin bersih dari korupsi. Nilai CPI Singapura sebesar 85 artinya tergolong negara yang paling bersih dari korupsi. Di urutan kedua ada negara Malaysia yang sempat menyentuh skor 52. Artinya Malaysia bisa dibilang sebagai negara dengan tingkat korupsi yang terlalu tinggi. Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Thailand, Philipina dan Vietnam memiliki skor CPI di bawah 50 atau mendekati 0, yang artinya negara-negara tersebut tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi cukup tinggi.

Selain korupsi, aliran dana masuk FDI juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara diukur dengan menggunakan nilai *Gross Domestic Product* (GDP). Sukirno (2002) menyatakan bahwa GDP adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara atau wilayah dalam satu periode waktu tertentu. Jadi, jika nilai GDP suatu negara tinggi, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas perekonomian negara tersebut berjalan dengan baik dan cenderung stabil. Hal itulah yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya.



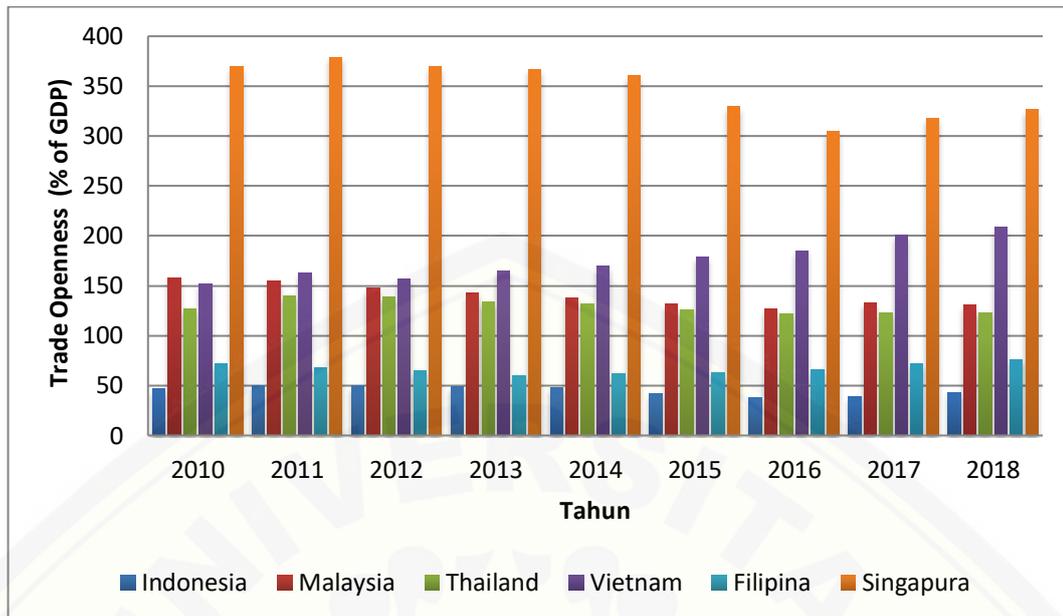
Gambar 1.4. Nilai GDP di ASEAN dalam Billion US\$ Dollars Tahun 2010 – 2018 (Sumber: World Bank, data diolah)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa rata-rata negara ASEAN memiliki nilai GDP yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Artinya, perekonomian negara-negara ASEAN memiliki progres yang baik. Investasi berskala besar dalam infrastruktur dan konsumsi pribadi, yang digerakkan oleh kelas menengah yang berkembang dan reformasi dalam kebijakan sosial, adalah dua mesin peningkat pertumbuhan dalam wilayah ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 269 juta jiwa, serta wilayah yang paling luas, seluas 1.919.000 kilometer persegi, memiliki nilai GDP yang paling tinggi, jauh meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya, tanpa

terkecuali Singapura sebagai negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Indonesia memiliki pasar yang luas, sehingga akan menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya.

Faktor lain yang tak kalah penting dalam menentukan masuknya FDI ke dalam suatu negara adalah *Trade Openness* atau keterbukaan perdagangan. Definisi dari *trade openness* adalah rasio dari nilai ekspor ditambah dengan impor per GDP (*Gross Domestic Product*) yang merupakan indikator derajat hubungan perekonomian suatu negara terhadap negara lainnya. Menurut *World Bank* (2019), *Trade Openness* yang dinyatakan dengan *Trade (% of GDP)* merupakan rasio dari jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari GDP. *trade openness* juga dapat diartikan sebagai bentuk ukuran kebijakan keterbukaan ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan instrumen internasional sebagai upaya pencegahan terjadinya peningkatan sikap ketergantungan ekonomi yang nantinya akan merusak dinamika perekonomian nasional (Simorangkir dan Yanikkaya dalam Khoiriyah, 2016: 2).

Secara teori, *trade openness* dapat memberikan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat. Keuntungan tersebut bisa berupa pembukaan akses pasar yang lebih luas, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Selain itu, dengan *trade openness* memungkinkan adanya modal yang mengalir dari luar negeri yang berwujud FDI (Purwanto, 2011).



Gambar 1.5. Nilai Trade Openness dalam skala rasio di ASEAN Tahun 2010-2018 (Sumber: World Bank, data diolah)

Hoang (2012: 9) menyatakan bahwa dengan nilai *trade openness* yang tinggi, menyebabkan *trade barrier* semakin menurun. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi investor asing untuk dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dari negara *host Country* untuk dapat melakukan *reexport*.

Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi FDI. Namun, diputuskan untuk memilih menganalisa 4 variabel yaitu ICT yang diukur dengan nilai presentase pengguna internet, persepsi korupsi dengan menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI), Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan nilai dari *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Trade Openness* yang diukur dengan rasio dari jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari GDP yang dinyatakan dengan Trade (% of GDP) untuk melihat bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi investasi asing langsung atau FDI di negara-negara ASEAN.

Pemilihan judul dalam penelitian ini karena permasalahan yang diangkat sangat penting dan relevan untuk diteliti karena berkaitan dengan isu-isu ekonomi yang sedang hangat dibahas. Selain itu FDI sendiri yang notabene aliran modal jangka panjang, juga diharapkan sebagai pendorong pembangunan ekonomi bagi negara-negara ASEAN. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui bagaimana

pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap investasi asing atau FDI.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan segenap proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan faktanya, pembangunan ekonomi membutuhkan pembiayaan yang terbilang besar. Hal ini yang seringkali menjadi kendala utama di banyak negara, khususnya negara-negara berkembang. Banyak alternatif pembiayaan yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Salah satu pilihan sumber pembiayaan adalah investasi. Teori ekonomi pembangunan menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki hubungan yang positif. Sumber pembiayaan berupa investasi dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dari luar negeri, contohnya adalah Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment*.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya ke dalam suatu negara. Dimana pada penelitian ini dipilih 4 variabel yang diduga bisa mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi, yaitu dengan melihat Perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) yang diukur dengan presentase pengguna internet setiap negara sampel, Persepsi Korupsi yang diukur dengan nilai *Corruption Perception Index* (CPI) dari setiap negara sampel, dan pertumbuhan ekonomi dari tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Trade Openness* yang diukur dengan rasio dari jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari GDP yang dinyatakan dengan Trade (% of GDP) terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) dari tahun 2010-2018, berdasarkan pada penjelasan tersebut pokok permasalahanyang dapat diangkat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh ICT, Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Trade Openness terhadap FDI Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura ?

2. Seberapa besar Pengaruh ICT Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Trade Openness terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Perkembangan ICT, Persepsi Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura
2. Untuk mengetahui Seberapa besar Pengaruh ICT Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Trade Openness terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi syarat kelulusan guna mendapatkan gelas Sarjana dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, namun juga memilikimanfaat yang lebih besar terutama dalam kajian *Foreign Direct Investment* (FDI). penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan verifikasi empiris dari fenomena perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT), persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, *trade openness* dan *Foreign Direct Investment* (FDI).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan memberikan ukuran empiris dalam mitigasi risiko perkembangan ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, *trade openness* dan FDI.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang ilmu ekonomi terutama terkait kajian ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, *trade openness* dan FDI.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan tolak ukur dalam pengukuran serta pengimplementasian kebijakan terkait

perkembangan ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, trade openness dan FDI.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru bagi *stake holder* dalam menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan penanaman FDI.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Investasi Asing Langsung/ FDI (*Foreign Direct Investment*)

Menurut Krugman dan Sarwedi (2002) bahwa Foreign Direct Investment (FDI) merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas yang berdaya saing di tingkat internasional. *Foreign Direct Investment* tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam *corporate governance mechanism*.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memberikan definisi mengenai FDI sebagai investasi yang dilakukan suatu perusahaan di suatu negara kepada perusahaan di negara lain dengan tujuan untuk mengendalikan operasi perusahaan di negara lain tersebut. Dapat dijelaskan apabila, FDI terjalin hubungan antar perusahaan induk dengan perusahaan afiliasinya di negara lain. Agar dapat dikatakan sebagai FDI, investasi yang dilakukan perusahaan induk harus dapat mengendalikan operasional perusahaan afiliasi di luar negeri. UNCTAD menjelaskan apa yang dimaksud dengan kontrol tersebut yaitu dengan kepemilikan saham 10%. Investasi kepemilikan yang kurang dari 10% digolongkan sebagai jenis investasi portofolio. (Arifin, 2008)

Membeli alat atau fasilitas produksi seperti mesin, pabrik, lahan dan bahan baku adalah bentuk dari investasi langsung yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan bisnis (Todaro, 2000). *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan suatu investasi jangka panjang bagi negara yang sedang berkembang. Kedatangan penanam modal asing (PMA) dapat membantu pembangunan ekonomi, dalam

hal pembangunan modal, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga dapat membentuk sumber- sumber baru. Investasi merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, jika meningkatnya kapasitas pendapatan nasional maka kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa juga semakin meningkat (Suwarno, 2008).

Menurut beberapa ahli, Teori *Foreign Direct Investment* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori “Dorongan Kuat” (*Big Push Theory*)

Teori “Dorongan Kuat” dikaitkan dengan nama Prof. Paul N. Rosenstein-Rodan. Teori tersebut menyatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang atau berkembang, dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk sejumlah minimum investasi. Dalam menekankan dalilnya ini ia menarik analogi dengan studi MIT. Ada sejumlah sumber minimum yang harus disediakan jika suatu program pembangunna diharapkan berhasil. Memacu suatu negara menuju swasembada adalah sedikit mirip dengan kapal terbang yang tinggal landas. Ada suatu titik kritis kecepatan yang harus dilewati sebelum kapal itu dapat terbang. Teori itu menyatakan bahwa cara kerja “sedikit demi sedikit” tidak akan berhasil mendorong ekonomi pada lintasan pembangunan; tetapi suatu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak dalam hal ini. ia memerlukan tercapainya ekonomi eksternal, yang timbul dari pendirian secara serentak Industri-industri. Dengan demikian syarat mutlak seperti itu dan ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil (Jhingan, 2014).

Rosenstein-rodan membedakan menjadi 3 macam syarat mutlak minimal dan syarat ekonomi eksternal. Pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Dalam hal ini unsur teknologi sangat dibutuhkan dalam menunjang hal tersebut. Terskhusus syarat mutlak minimal pada persediaan modal *overhead* sosial. Kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Artinya, *size* atau skala ekonomi yang besar diperlukan. Untuk mengukur hal tersebut, dapatdilihat dari

nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Ketiga, syarat mutlak minimal dalam persediaan tabungan (Jhingan, 2014).

Menurut Rosenstein-rodan (Jhingan, 2014) mengenai peranan syarat mutlak minimal tersebut dengan lebih rinci dalam pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

a. Syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi

Jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses, membawa kepada peningkatan penghasilan. Ia berkeyakinan kuat bahwa peningkatan penghasilan memainkan suatu peranan yang penting didalam menurunkan rasio modal-output di amerika serikat. ia menganggap modal overhead sosial sebagai contoh paling enting dari syarat mutlak minimal dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran. Jasa dari modal overhead sosial yang terdiri dari industri dasar seperti tenaga, angkutan dan perhubungan adalah secara tidak langsung bersifat produktif dan mempunyai masa persiapan lama. Mereka tidak dapat diimpor. Pembangunannya membutuhkan investasi dengan “modal awal yang cukup besar”. Dengan demikian kelebihan kapasitas mungkin akan tetap ada pada beberapa waktu. Investasi ini juga mencakup paket industri minimal untuk berbagai pekerjaan umum sedemikian rupa sehingga suatu negara terbelakang atau berkembang harus melakukan investasi antara 30-40% dari total investasinya pada bidang-bidang ini. oleh karena itu, investasi ini harus mendahului investasi-investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan.

Menurut Rodan, modal *overhead* sosial mengandung 4 macam syarat mutlak minimal. Pertama, dilihat dari segi waktu ia tak dapat diubah lagi dan oleh karena itu harus mendahului investasi lain yang bersifat produktif secara langsung. Kedua, ia mempunyai masa pakai minimum, sehingga membuatnya sangat mampat. Ketiga, ia mempunyai masa persiapan yang lama. Terakhir, ia terdiri dari suatu paket industri minimal yang tak dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial ini merupakan salah satu dari hambatan pokok pembangunan di negara terbelakang atau berkembang. Karena itu, diperlukan

investasi awal yang tinggi pada modal overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi-investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan.

b. Syarat mutlak minimal pada permintaan

Syarat mutlak minimal pada permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan di negara terbelakang atau berkembang. Maksud utama adalah karena proyek proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai risiko tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar, maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Rosenstein-Rodan menggunakan contoh terkenal dari suatu pabrik sepatu untuk menjelaskan pokok pandangannya. Ambil contoh suatu ekonomi tertutup. Andaikan 100 penganggur pekerja tersembunyi dipekerjakan dalam satu pabrik sepatu yang gajinya merupakan penghasilan tambahan. Jika pekerja-pekerja ini membelanjakan semua pendapatannya pada sepatu yang mereka buat, pasaran sepatu akan memperoleh permintaan yang pasti dan dengan demikian berhasil. Pada kenyataannya, mereka tidak akan mungkin membelanjakan semua tambahan pendapatan mereka hanya pada sepatu. Karena keinginan manusia bermacam-macam. Orang di luar pabrik pun tidak akan membeli tambahan sepatu bila mereka miskin dan tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal mereka. Dengan demikian pabrik baru itu akan ditinggalkan karena pasar tidak memadai.

Untuk menambah contoh tersebut, misalnya 10.000 pekerja penganggur itu digunakan pada 100 pabrik (kebalikan dari 100 pekerja dalam 1 pabrik) yang memproduksi bermacam-macam barang konsumsi dan para pekerja membelanjakan gaji mereka untuk membeli barang-barang tersebut. Produsen-produsen baru itu akan saling menjadi langganan satu sama lain dan ini menciptakan pasar bagi barang-barang mereka. Saling lengkap dalam permintaan mengurangi risiko dalam mendapatkan pasar dan meningkatkan rangsangan untuk investasi. Dengan kata lain, syarat mutlak minimal pada permintaan inilah yang memerlukan adanya suatu jumlah minimum investasi dalam industri yang saling

berkaitan untuk mengatasi kecilnya pasar dan rendahnya dorongan berinvestasi di negara terbelakang atau berkembang.

c. Syarat Mutlak Minimal Pada Persediaan Tabungan

Elastisitas pendapatn yang tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga teori Rosenstein. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan . jumlah tabungan ini tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada rata-rata tabungan. Tapi tidak ada satu negara pun yang pernah mempunyai tingkat tabungan marginal yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan sebelumnya.

Berdasarkan 3 syarat mutlak minimal ini dan adanya ekonomi eksternal yang dapat dikembangkannya, maka “dorogan kuat” atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan di negar terbelakang atau berkembang. “sesudah itu, barangkali diperlukan adanya syarat mutlak minimal lain yaitu semangat dan dorongan membangun,” tulis rodan. Tapi cara kerja sedikit demi sedikit melalui usaha kecil dan tertutup tidak cukup berpengaruh pada pertumbuhan. Untuk itu diperlukan sumber investasi lain investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) karena iklim pembangunan hanya tercipta bila investasi dilakukan dengan kecepatan tertentu atau ukuran minimum tertentu (Jhingan, 2014).

2. Teori *Electric Dunning*

Teori dunning merupakan salah satu referensi teori untuk mempelajari FDI berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing untuk berinvestasi yang dikenal dengan “*The OLI Paradigm*”. Dunning menduga bahwa sebuah perusahaan akan tertarik berinvestasi dalam bentuk *Foreign Direct Invesment* (Nayak & Choudury, 2014; Anoraga, 1995: 57; Kurniati, *et al*, ship 2007).

Menurut Dunning (1993) terdapat tiga tipe FDI berdasarkan motivasi dibalik investasi dari perspektif perusahaan, yaitu:

- a. *market seeking*, yaitu investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain daripada mengguakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal (Kurniati, et al, 2007). Investasi ini juga disebut sebagai FDI Horizontal yang melakukan fasilitas produksi di *host country*, pertimbangan pemilihan lokasi berdasarkan *market seeking* akan mendasarkan pada pertimbangan faktor-faktor seperti luasnya pasar dan pendapatan masyarakat di negara penerima investasi (Susanto, 2012). Dengan cara ini investor akan mampu mengurangi biaya ekspor yang harus dilakukan ketika memproduksi di negara asal. Dalam hal ini ukuran pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi negara tujuan FDI mempunyai peranan penting dalam keputusan investor untuk berinvestasi (Pambudi & Hakim 2013).
- b. *Efficiency seeking*, yaitu investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengambil keuntungan dari jangkauan dan skala ekonomi dari negara tujuan FDI (Susanto, 2012; Pambudi & Hakim, 2013). Tingkat inflasi dan nilai tukar merupakan salah satu determinasi *locational advantage*, kestabilan makroekonomi, tingkat keterbukaan perdagangan dan risiko potensial bagi para investor asing (Wadhwa, 2011).
- c. *Resource Seeking*, yaitu investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada negara yang memiliki sumberdaya yang lebih potensial daripada negara asal. Biaya produksi yang lebih rendah merupakan modal bagi peningkatan daya saing produk di pasar. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan multinasional akan membandingkan faktor-faktor seperti tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, dan ketersediaan infrastruktur (Susanto, 2012). Tujuan dari investor menanamkan FDI pada tipe ini adalah untuk mendapatkan sumberdaya yang tidak tersedia di negara asal, seperti sumberdaya alam, bahan baku produksi, dan tenaga kerja yang murah.

Selaras dengan penelitian dari Kurniati, et al (2007), Wadhwa, (2011), Udo & Obiora (2006), pendekatan elektik dimaksudkan dengan menggunakan perubahan global yang terjadi, dimana aliran FDI dari negara berkembang yang besar masih

bergantung pada determinan tradisional seperti *market size*, tingkat pendapatan, infrastruktur, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memfasilitasi spesialisasi produk yang efisien serta stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga.

3. Teori Siklus Produksi Vernom

Raymond Vernom (1966) menjelaskan FDI dengan model yang disebut “*Product Life Cycle Theory*” atau teori siklus produksi. Vernom menghubungkan antara perdagangan internasional dengan FDI sebagai suatu tahapan yang berurutan mengikuti siklus produksi suatu produk. Pengembangan produk-produk baru menurut vernom disediakan oleh kebutuhan dan kesempatan pasar. Pasar tempat perusahaan tersebut adalah pasar yang paling dekat untuk dijangkau, yaitu pasar dalam negeri (Jamli, 1992: Nayak & Choundhury, 2014):

- a. Tahap inivasi, pada tahap ini peranakan ilmuan dan teknisi dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang sangat besar yaitu untuk perkembangan yang sangat besar yaitu untuk perkembangan suatu produk. Produk-produk baru ini selanjutnya akan diciptakan, diproduksi dan dijual di negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi.
- b. Tahap pertumbuhan, pada tahap ini penjualan produk tersebut mengalami peningkatan sehingga terjadi produksi secara besar-besaran dan jumlah industri menjadi semakin meningkat, hal ini mengakibatkan peluang pasar di luar negeri menjadi lebih menguntungkan.
- c. Tahap Kematangan produk, pada tahap ini produk-produk mulai terstandarisasi, peranan tenaga terampil sangat dibutuhkan. Hal-hal tersebut menimbulkan dorongan untuk melakukan ekspansi keluar negeri dengan melakukan investasi.

Tahap ketiga dalam teori vernom terjadi dorongan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri untuk mendapatkan input yang lebih murah dan menekan biaya produksi. Kondisi ini mendorong terjadinya aliran investasi asing langsung atau FDI, model vernom saat ini sudah tidak begitu mudah diterapkan, sebab perusahaan multinasional telah mengubah sifat dengan perkembangan

(*Multinational Corporations*) yang berada di Eropa dan Jepang (Anoraga, 1995: 53)

2.1.2 Teori Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

1. Teori *Digital Economy* Tapscott

Ekonomi digital pertama kali dikemukakan oleh Don Tapscott (1995) dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Dimana buku tersebut menjelaskan bagaimana internet mengubah cara manusia dalam berbisnis. Menurut Tapscott, *internet* (net) dan *world wide web* (web) memunculkan suatu bentuk ekonomi baru berdasarkan pada jaringan kecerdasan manusia (*networking of human intelligence*). Era digital economy atau era *new economy* muncul sewaktu organisasi mulai mengawinkan produktivitas TI dari sumber daya aktiva dengan knowledge dari sumber daya manusia untuk menjangkau transaksi global lintas batas dalam bentuk *connected economy*. Di era *new economy*, organisasi memanfaatkan TI sebagai *enabler* dan *strategic weapon*. Di era ini pertanyaannya tidak lagi *what is your business* tetapi lebih ke *how is your digital business mode* (Hartono 2016; Yuniarti 2019).

Menurut Don Tapscott, ekonomi digital mempunyai 12 atribut. (1) *Knowledge*. Di ekonomi digital, power of the knowledge diterjemahkan menjadi inovasi-inovasi unggul lewat kesempatan-kesempatan terbaru untuk menciptakan keunggulan kompetitif. (2) *Digitization*. Transaksi bisnis menggunakan digital technology dan digital information. Pelanggan-pelanggan sebagai digital customers menggunakan digital devices untuk melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan penjual barang dan jasa sebagai digital enterprises. (3) *Virtualization*. Di ekonomi digital dimungkinkan untuk merubah barang fisik menjadi barang virtual. Modal intelektual dikonversikan menjadi modal digital. (4) *Molecularization*. Di ekonomi digital, *heavy organization* di organisasi tradisional berubah menjadi *light organization* yang fleksibel, *M-form organization* (organisasi multidivisional) bergeser menjadi *E-form organization* atau *ecosystem form organization* yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. (5) *Internetworking*. Menggunakan jaringan internet untuk membangun interkoneksi

membentuk jaringan ekonomi. (6) *Disintermediation*. Tidak diperlukan lagi perantara, transaksi dapat dilakukan langsung *peer-to-peer*. (7) *Convergence*. Konvergensi komputasi, komunikasi, dan konten bersama-sama membentuk multimedia interaktif yang menjadi platform yang penting. (8) *Innovation*. Imaginasi dan kreativitas manusia merupakan sumber-sumber nilai utama membentuk *innovation economy*. (9) *Prosumption*. Di ekonomi lama aspek kunci adalah *mass production*, sedang di ekonomi digital adalah *mass customization*. Perbedaan antara produser dan kustomer menjadi kabur, setiap kustomer di *information highway* dapat juga menjadi produser. (10) *Immediacy*. Perbedaan waktu saat memesan barang dengan saat diproduksi dan dikirim menyusut secara drastis disebabkan kecepatan proses *digital technology*. (11) *Globalization*. Menurut Peter Drucker "*knowledge knows no boundaries*." Tidak ada batas untuk transaksi global. (12) *Discordance*. Akan muncul jurang pemisah antara yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami teknologi. Supaya *survive*, semua pemain di ekonomi digital harus *technologically literate* yaitu mampu mengikuti *technological shifts* menuju interaksi dan integrasi dalam bentuk *internetworked economy* (Hartono, 2019).

Dari sisi terminologi, penafsiran atas terminologi ekonomi digital masih beragam. Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), ekonomi digital adalah "*comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and services through e-commerce* (ekonomi digital adalah pasar yang dibentuk oleh teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui *e-commerce*). Pengertian ekonomi digital secara luas diberikan oleh negara-negara tergabung dalam G20, yakni *a broad range of economic activities that includes using digitized information and knowledge as the key factor of production, and modern information networks as the important activity space* (berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor utama produksi, dan jaringan informasi modern sebagai bagian kegiatan yang penting) (Yuniarti, 2019).

Ekonomi digital melahirkan inovasi yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi, terutama *mobile internet*, *Internet of Thing (IoT)*, *cloud computing* dan *big data and advance analytic*. Beragam model bisnis baru muncul menawarkan servis sesuai dengan kebutuhan (*customized services*). *Customized service* yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta prinsip *sharing* yang membuat harga semakin kompetitif menjadi kekuatan model bisnis berbasis teknologi tersebut. Tak heran apabila servis yang dihasilkan diminati oleh konsumen, seperti pada konsep *ride hailing* pada taksi/ojek berbasis aplikasi (Yuniarti, 2019).

2.1.3 Teori Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut World Bank dan IMF, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dengan menyalahgunakan hak-hak dari pihak lain. Yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau kedudukannya dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain (*Black's Law Dictionary*, 1990). Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006).

Definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi adalah perilaku ketidakjujuran, termasuk perilaku para pejabat di sektor publik, dimana para politisi dan pelayan masyarakat memperkaya diri sendiri secara tidak tepat dan melawan

dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka (Nawatmi, 2013).

Aditjandra (2002), menyatakan bahwa terdapat tiga macam model korupsi, diantaranya sebagai berikut:

1) Model Korupsi Lapisan Pertama

Model korupsi lapisan pertama adalah bentuk suap (*bribery*), yang datang dari pengusaha atau warga sipil yang membutuhkan pelayanan dari birokrat petugas pelayan publik dalam hal pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, sebagai bentuk pemerasan (*extortion*) yang datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya sebagai balas jasa.

2) Model korupsi Lapisan Kedua

Model korupsi lapisan kedua adalah jaringan hugungan antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, dan perusahaan yang memiliki kedudukan istimewa. Korupsi bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan nepotisme antar beberapa anggota jaringan korupsi dan lingkungannya bisa mencapai level nasional.

3) Model Korupsi Lapisan Ketiga

Korupsi lapisan ketiga adalah korupsi yang berskala internasional, dimana lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya menonjol oleh pimpinan rezim yang menjadi pimpinan jaringan korupsi internasional tersebut. Lembaga-lembaga tersebut menggantikan kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapisan kedua.

1. Teori Means-End Scheme Robert

Dalam bukunya *Social Theory and Social Structure* (1957), Robert K. Merton menyatakan bahwa korupsi termotivasi oleh sikap yang berasal dari tekanan-tekanan sosial yang melahirkan pelanggaran-pelanggaran norma. Dalam budaya yang menitikberatkan keberhasilan ekonomi sebagai sebuah tujuan paling akhir seperti yang diterapkan oleh negara-negara penganut faham kapitalisme, maka negara tersebut akan memberi ruang yang lebih bagi

mutasi virus korupsi. Ketika virus korupsi berkembang di lingkungan kekuasaan pemerintahan, mereka dapat bermutasi menjadi virus manipulasi, baik data informasi maupun opini. Sedangkan, ketika berkembang di lingkungan organisasi yang lebih kecil, virus korupsi dapat bermutasi menjadi virus kolusi dan nepotisme, kedekatan kekerabatan darah atau visi-misi menjadi habitat subur perkembangannya.

Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori means-ends scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (means) yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, capital, keterampilan dan sebagainya (Handoyo 2009:55).

Apabila kita lihat dari aspek penegakkan hukum di beberapa negara terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat terlihat bahwa tidak adanya suatu keharmonisan antar para penegak hukum. Tidak seimbangny para penegak hukum dengan aturan hukum yang diterapkannya. Kalau kita lihat para penegak hukum seperti aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan seakan-akan melindungi bahkan menutup-nutupi kesalahan para koruptor kerah putih di negeri ini. Bandingkanlah dengan berbagai bentuk permasalahan hukum yang dilakukan oleh rakyat kecil, para penegak hukum pastilah dengan cepat akan bertindak, tetapi apabila kasus hukum tersebut menimpa para elit yang

berkuasa dan memegang otoritas kekuasaan maka para penegak hukum di negeri ini akan sungkan atau bahkan dengan sengaja membolak-balikkan fakta agar kasus hukum seperti korupsi tersebut tidak terpublikasikan di media. Ironis memang melihat realitas permasalahan hukum di Indonesia khususnya permasalahan yang menyangkut tentang korupsi. Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan kepada para koruptor kerah putih. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

2. Teori Solidaritas Emile Durkheim

Menurut Angha (2002), menjelaskan bahwa Buku *The Division of Labor in Society* merupakan suatu upaya Durkheim untuk mengkaji suatu gejala yang melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Durkheim mengemukakan bahwa di bidang perekonomian seperti di bidang industri modern terjadi penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja yang mengakibatkan pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan okupasi yang semakin rinci. Tujuan kajian tersebut adalah untuk memahami fungsi pembagian kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain.

Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Jika dilihat

pembagian kerja memang menjadi tuntutan ekonomi yang bisa merusak solidaritas sosial akan tetapi menurut Durkheim fungsi ekonomis yang dimainkan oleh pembagian kerja ini menjadi tidak penting jika dibandingkan dengan efek moralitas yang dihasilkannya. Maka fungsi sesungguhnya dari pembagian kerja adalah untuk menciptakan solidaritas antara dua orang atau lebih (Angha, 2002)

Dalam *The Division of Labor in Society* (Angha, 2002) Durkheim menggunakan ide patologis untuk mengkritik bentuk “ abnormal” yang ada dalam pembagian kerja masyarakat modern. Pembagian kerja tersebut adalah:

- a. Pembagian kerja anomik, yaitu tidak adanya regulasi dalam masyarakat yang menghargai individualitas yang terisolasi dan tidak mau memberi tahu masyarakat tentang apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini mengacu pada suatu kondisi sosial dimana manusia kekurangan pengendalian moral.
- b. Pembagian kerja yang dipaksakan, yaitu aturan yang dapat menimbulkan konflik dan isolasi serta yang akan meningkatkan anomie. Hal ini menunjuk pada norma yang ketinggalan zaman dan harapan-harapan individu, kelompok, dan kelas masuk ke dalam posisi yang tidak sesuai bagi mereka.
- c. Pembagian kerja yang terkoordinasi dengan buruk, disini Durkheim kembali menyatakan bahwa solidaritas organik berasal dari saling ketergantungan antarmereka. Jika spesialisasi seseorang tidak lahir dari saling ketergantungan yang makin meningkat melainkan dalam isolasi, maka pembagian kerja tidak akan terjadi di dalam solidaritas sosial

Angha (2002) menyebutkan bahwa Pemikiran sosiologis Emile Durkheim mengenai pembagian kerja dalam masyarakat dianalisis melalui solidaritas sosial. Tujuan analisis tersebut menjelaskan pengaruh (atau fungsi) kompleksitas dan spesialisasi pembagian kerja dalam struktur sosial dan perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bentuk-bentuk pokok solidaritas

1. Solidaritas Mekanis

Solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain dan karena mereka cenderung sangat percaya kepada moralitas bersama. Apapun pelanggaran

terhadap sistem bersama tidak akan dianggap main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap sistem moral hanya merupakan pelanggaran kecil namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat.

Menurut Durkheim solidaritas mekanis dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang disebutnya dengan “segmental”. Pada masyarakat tersebut belum terdapat pembagian kerja yang berarti. Dengan demikian tidak terdapat saling ketergantungan antarkelompok yang berbeda karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok juga terpisah satu sama lain. Tipe solidaritas tersebut yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakawanan ini diikat oleh suatu *collective conscience* (kesadaran kolektif) yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat.

2. Solidaritas Organik

Masyarakat dengan solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif. Dimana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau sekmen tertentu dari masyarakat bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Dalam hal ini, kurangnya moral kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum. Durkheim berpendapat masyarakat modern bentuk solidaritas moralnya mengalami perubahan bukannya hilang.

Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individual yang lebih mandiri, akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain, karena masing-masing individu hanya merupakan satu bagian saja dari suatu pembagian pekerjaan sosial. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat dengan solidaritas organik bertahan karena perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Solidaritas organik merupakan sebuah sistem terpadu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling tergantung seperti bagian-bagian suatu organisme biologis.

Berbeda dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada kesadaran kolektif maka solidaritas organik didasarkan pada hukum dan akal.

3. Kesadaran Kolektif dalam Masyarakat Organik

Pada masyarakat organik, kesadaran kolektif lebih berperan untuk menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat ikatan yang muncul dari adanya saling ketergantungan fungsional yang semakin bertambah. Pertumbuhan dalam pembagian kerja (solidaritas organik sebagai hasilnya) tidak menyebabkan hilangnya kesadaran kolektif tetapi hanya mengurangi arti penting dari kesadaran kolektif tersebut.

Durkheim menekankan pada pentingnya kesadaran kolektif bersama yang mungkin ada dalam berbagai kelompok pekerjaan dan profesi. Keserupaan dalam kegiatan-kegiatan dan kepentingan pekerjaan memperlihatkan suatu homogenitas internal yang memungkinkan berkembangnya kebiasaan, kepercayaan, perasaan, dan prinsip moral atau kode etik bersama.

4. Evolusi Sosial

Kesadaran kolektif yang mendasari solidaritas mekanik paling kuat berkembang pada masyarakat primitif. Karena pembagian kerja semakin meluas, kesadaran kolektif perlahan-lahan mulai hilang. Tetapi heterogenitas yang semakin bertambah ini tidak menghancurkan solidaritas sosial, sebaliknya semakin membuat individu atau kelompok saling ketergantungan satu sama lain. Meningkatnya secara bertahap saling ketergantungan fungsional dalam berbagai bagian dalam masyarakat ini memberikan alternatif baru untuk kesadaran kolektif sebagai solidaritas sosial.

Indeks Korupsi adalah hasil pengukuran yang dikenal sebagai alat *Transparency International* (TI) yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1995. TI membentuk sebuah komite yang bernama *Index Advisory Committee* (IAC) pada tahun 1996 untuk memberikan masukan dengan alat ukur korupsi yang global. Indeks Korupsi adalah data yang dapat menggambarkan tingkat terjadinya korupsi di suatu negara. Data dikumpulkan dari persepsi para pengusaha dan para ahli tentang kinerja pemerintah yang berkaitan dengan layanan yang bebas korupsi. Data indeks Korupsi yang dikeluarkan tiap tahun oleh TI dipercaya oleh

banyak pihak sebagai data yang valid dalam mengukur praktek korupsi di suatu Negara (*Transparency International*, 2003). Skor CPI dimulai dari 0 – 100, dimana semakin mendekati angka 100 berarti semakin baik dan tingkat korupsi berarti semakin rendah, sedangkan apabila semakin mendekati angka 0 berarti dapat dikatakan negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi (*Transparency International*, 2019)

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

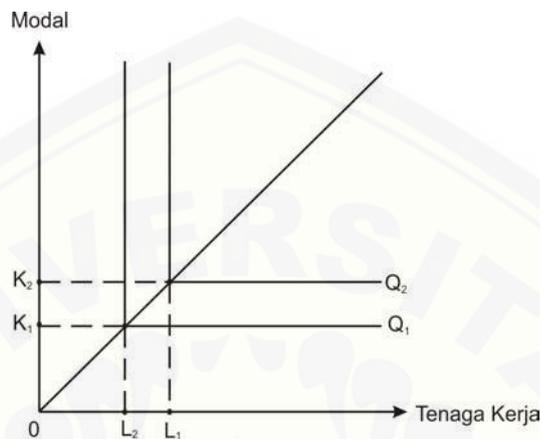
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan pengembangan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional. Analisis keynes dianggap kurang sempurna karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harrod-Domar berusaha untuk menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Jhingan, 2014).

Jhingan (2014) menyebutkan bahwa Teori Harrod-Domar memiliki beberapa asumsi, yaitu:

- a. ada equilibrium awal pendapatan dalam keadaan *full employment*.
- b. tidak ada campur tangan pemerintah.
- c. tidak ada kesulitan di dalam penyesuaian antara investasi dan penciptaan kapasitas produktif.
- d. kecenderungan menabung rata-rata sama dengan kecenderungan menabung marginal.
- e. kecenderungan menabung marginal tetap konstan.
- f. koefisien modal, yaitu rasio stok modal terhadap pendapatan diasumsikan tetap (*fixed*).
- g. tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai seumur hidup.
- h. tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan tahun yang sama.
- i. tingkat harga umum konstan, yaitu upah uang sama dengan pendapatan nyata.

- j. tidak ada perubahan tingkat suku bunga.
- k. ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produksi.
- l. modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal.



Gambar 2.1 Fungsi Produksi Harrod-Domar (Sumber: Todaro, 2006)

Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu(modal dan tenaga kerja yang tidak substitutif). Untuk menghasilkan Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2 , misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K_2 .

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (Investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut.

Jika menetapkan $COR = k$, rasio kecenderungan menabung (MPS) = S yang merupakan proporsi tetap dari output total dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka kita bisa menyusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana sebagai berikut:

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau (s), dari pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu, kita dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana:

$$S = sY \quad (2.1)$$

2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga kita dapat menuliskan persamaan yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Namun, karena jumlah stok modal, K , mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output, Y , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal output, k , maka:

$$\frac{k}{y} = k$$

Atau

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = k$$

Atau, akhirnya

$$\Delta K = k\Delta y \quad (2.3)$$

3. Terakhir, yebungan nasional netto (S) harus sama dengan investasi netto (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = I \quad (2.1)$$

Dari persamaan (2.1) telah diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan (2.2) dan (2.3) telah diketahui bahwasanya:

$$I = \Delta k = k\Delta y$$

Dengan demikian, kita dapat menuliskan “identitas” tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \quad (2.5)$$

Atau bisa diringkas menjadi

$$sY = k\Delta Y \quad (2.6)$$

selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan (2.6) dibagi mula-mula dengan Y dan kemudian dengan K , maka didapat:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (2.7)$$

Sisi kiri dari persamaan (2.7), atau $\frac{\Delta Y}{Y}$ sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP (yaitu, angka presentase perubahan GDP) (Todaro, 2006)

Persamaan (3.7), yang merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\frac{\Delta Y}{Y}$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara “positif” berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni, semakin banyak bagian GDP yang ditabung dan diinvestasikan, maka akan lebih besar lagi pertumbuhan GDP yang dihasilkannya) dan secara “negatif” atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (yakni, semakin besar rasio modal-output nasional atau k , maka tingkat pertumbuhan GDP akan semakin rendah).

Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan (3.7) diatas sangatlah sederhana. Agar bisa tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan aktual yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi–banyaknya tambahan output yang didapat dari tambahan satu unit investasi–dapat diukur dengan kebalikan rasio modal-output, k , karena rasio yang sebaliknya ini, yakni $1/k$, adalah rasio output-modal atau rasio output-investasi. Selanjutnya, dengan mengalikan tingkat investasi baru $s = I/Y$, dengan tingkat produktivitasnya, $1/k$,

maka akan didapat tingkat pertumbuhan dimana pendapatan nasional atau GDP akan naik (Todaro, 2006)

2.1.5 Teori Trade Openness

Untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, setiap negara bergantung kepada negara lain karena tidak semua komoditas dimiliki oleh setiap negara, maka terjadilah perdagangan internasional. Sehingga, perdagangan internasional timbul karena faktor permintaan yang berupa permintaan suatu barang atau jasa yang ditentukan oleh selera dan pendapatan serta faktor penawaran yang berupa perbedaan jumlah, jenis, kualitas, cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi di dalam proses produksi atau perbedaan biaya produksi yang dapat mengakibatkan perbedaan harga hasil produksi (Nopirin, 1995).

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), rasio perdagangan terhadap PDB (*trade-to-GDP*) atau biasa disebut *Trade Openness ratio* sering digunakan untuk mengukur pentingnya hubungan transaksi internasional terhadap transaksi domestik. Indikator ini dihitung untuk setiap negara sebagai rata-rata yang sederhana (*mean*) dari total perdagangan (jumlah ekspor dan impor barang dan jasa) yang berkaitan terhadap PDB. Meskipun kata “openness” atau “keterbukaan” menimbulkan pro dan kontra, nilai rasio yang rendah tidak selalu berarti tinggi (tarif atau non tarif) hambatan perdagangan luar negeri, tetapi bisa jadi karena faktor seperti ukuran ekonomi dan keadaan geografis yang terpencil dari mitra dagang yang potensial. Sedangkan Menurut *World Bank* (2019), Trade Openness yang dinyatakan dengan *Trade (% of GDP)* merupakan rasio dari jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari GDP.

1. Teori Perdagangan Internasional Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) merupakan teori perdagangan internasional moderen, dimana teori tersebut menyatakan bahwa sebagai akibat dari jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki, (*endowment factors*) oleh masing-masing negara, sehingga terjadi adanya perbedaan harga barang yang diproduksi merupakan penyebab adanya perbedaan produktivitas antar negara. Maka

kemudian terjadilah perangan internasional. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) biasa dikenal sebagai “*The proportional Factor Theory*” dimana negara yang memiliki faktor produksi dalam jumlah yang relatif besar dan harga yang murah, maka akan terjadi spesialisasi produk untuk kemudian dilakukan kegiatan ekspor ke negara yang lain. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki faktor produksi dalam jumlah yang relatif kecil dan dengan harga yang mahal, maka negara akan mengimpor (Salvatore, 2014)

berikut adalah rumus atau formula trade openness

$$\text{Trade Openness} = \frac{X (\text{Constant 2010 US\$} + M (\text{Constant 2010 US\$})}{\text{GDP} (\text{Constant 2010 US\$})} \times 100\%$$

Keterangan:

X (% of GDP) = Ekspor (persentase dari PDB)

M (% of GDP) = Impor (persentase dari PDB)

a. Dampak Trade Openness

Selain memiliki dampak positif, trade openness juga mempunyai dampak negatif. Berikut ini adalah dampak trade openness terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara:

1. Dampak Positif

Berikut adalah dampak positif perdagangan internasional yang semakin terbuka, antara lain (Boediono, 1997):

- a) Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas, serta terjadinya spesialisasi produksi. Spesialisasi produksi dapat terjadi antar negara.
- b) Memperluas lapangan pekerjaan; Dengan terjadinya perdagangan antarnegara yang semakin terbuka, negara pengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar negeri. Naiknya tingkat produksi ini akan memperluas kesempatan kerja. Negara yang bertindak sebagai pengimpor juga mendapat manfaat, yaitu tidak memproduksi barang yang dibutuhkan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan.

- c) Sumber pemasukan kas negara atau devisa negara melalui bea masuk, pajak, dan biaya lain atas ekspor dan impor.
- d) Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
- e) Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Kerjasama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2. Dampak Negatif

Berikuta adalah dampak negatif perdagangan internasional yang semakin terbuka antara lain (Boediono, 1997):

- a) Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, salah satu contohnya yaitu munculnya ketergantungan terhadap negara-negara maju.
- b) Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran di suatu negara.
- c) Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri terutama industri kecil di suatu negara mengalami kerugian.
- d) Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju.
- e) Terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Hal ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif.
- f) Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju.

2.2 Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen

2.2.1 Hubungan Perkembangan Teknologi dan *Foreign Direct Investment*

Teknologi informasi dan komunikasi adalah penentu baru bagi masuknya arus FDI pada suatu negara. Diketahui bahwa perekonomian dunia saat ini

mengarah pada perekonomian berbasis informasi dan teknologi. Jika dulu beberapa negara mengalami hambatan karena keterbatasan faktor geografi, maka saat ini dengan adanya ICT faktor penghambat tersebut dapat teratasi. Perkembangan ICT yang begitu pesat telah mengubah fundamental hubungan antar negara, keunggulan kompetitif, dan peluang untuk pembangunan sosial ekonomi. Manfaat utama dari adanya kemajuan teknologi ICT adalah dapat meningkatkan informasi pemasaran dan meningkatkan efisiensi produksi.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa infrastruktur telekomunikasi tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun, juga untuk meningkatkan arus masuk FDI serta keterlibatan dalam global yang semakin kompetitif. Layanan informasi dan komunikasi yang canggih mampu memfasilitasi komunikasi internasional antara perusahaan induk dan afiliasi mereka di luar negeri. Integrasi ekonomi dunia cenderung didorong oleh investasi lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa satu dari sekian banyak peristiwa sejarah pembangunan dunia adalah kemajuan ICT. Secara detail ICT dapat merubah cara seseorang dalam menjalankan perusahaan, melakukan aktivitas sehari-hari, dan menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan. Sehingga, ICT mampu merubah persepsi investor asing dalam memperbaiki iklim investasi dan keputusan investor dalam menentukan negara yang akan menjadi lokasi investasi.

ICT merupakan gabungan dari beberapa variabel indikator, yaitu akses internet, jumlah pengguna mobile phone, dan lain sebagainya. ICT menjadi penyebab arus masuk FDI karena ICT mampu mempersingkat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk bertukar informasi melalui saluran yang memungkinkan (*Channel*). Salah satu manfaat dari kemajuan perkembangan ICT dalam perekonomian adalah sebagai sarana penunjang hubungan antar negara ataupun antar perusahaan. Pertukaran informasi adalah salah satu aspek penting yang harus diketahui oleh masing-masing negara sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

2.2.2 Hubungan Persepsi Korupsi dan Foreign Direct Investment

Korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah dengan cara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Secara ekonomi dengan keberadaan korupsi akan mengganggu laju pertumbuhan pendapatan dan kekayaan, sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan. Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro (1995, 1997, 2004) Korupsi menunjukkan hubungan negatif dengan laju pertumbuhan ekonomi dan merusak aliran investasi yang ada. Artinya jika korupsi meningkat maka investasi akan terganggu dan begitu juga pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

Leff (1964) dan Huntington (1968) mengindikasikan bahwa tidak semua korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Korupsi yang bersifat “*speed money*” memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana dengan adanya suap yang dilakukan oleh pengusaha, dapat memangkas proses demokrasi yang berbelit. Sehingga, dapat memperlancar roda perekonomian. Secara teoritis, korupsi dapat bertidak sebagai tangan menyambar (*grabbing hand*) dengan menaikkan biaya ransaksi bagi investor asing. Biaya tambahan yang timbul dari membayar komisi kepada politisi/birokrat untuk kontrak besar atau menyuap pejabat lokal untuk koneksi lisensi/izin, utilitas, perlindungan kebijakan, ketetapan pajak, yang dapat menaikkan biaya keseluruhan bisnis dan menurunkan profitabilitas investasi. Di sisi lain, korupsi juga bisa berperan sebagai tangan pembantu (*helping hand*) dimana korupsi diyakini bisa “memuluskan” roda perdagangan di hadapan kerangka hukum dan peraturan yang memberatkan (Bardhan, 1997). Habib dan Zurawicki (2002) dalam penelitiannya menunjukan hasil bahwa tingkat korupsi yang tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap arus masuk FDI di suatu negara. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Romadhona (2016) tentang pengaruh korupsi di Indonesia periode 2005-2014, persepsi korupsi menunjukkan hasil yang positif serta berpengaruh signifikan terhadap FDI.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Foreign Direct Investment

Menurut pandangan Keynes investasi bukan hanya ditentukan oleh suku bunga tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya yaitu situasi perekonomian. Investor melihat tingkat kestabilan ekonomi negara dari tingkat pertumbuhan pendapatan nasional negara yang dituju. Penjelasan tersebut sesuai dengan teori akselerasi yang menyatakan bahwa pendapatan nasional yang semakin meningkat akan semakin memerlukan barang modal yang semakin banyak (Sukirno, 2002).

Kemudian menurut Nonnemberg & Cardoso (2004), menjelaskan jika pertumbuhan produk domestik bruto yang kuat dapat meningkatkan aliran investasi asing langsung, tetapi suatu negara wajib memiliki kapasitas infrastruktur yang baik dalam rangka mengambil keuntungan dari manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menyiratkan sebuah pengembalian yang lebih tinggi bagi investor asing dalam peningkatan investasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Muqorobbin (2014) yang menunjukkan hasil apabila GDP memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap arus masuk FDI ke suatu negara.

2.2.4 Hubungan Trade Openness dan Foreign Direct Investment

Mankiw (2007) menyatakan bahwa suatu negara yang menerapkan keterbukaan ekonomi akan memperoleh banyak keuntungan positif, seperti perluasan pasar, peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan, mendorong masuknya arus modal internasional, serta mencegah terjadinya praktik monopoli pada pasar global. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran ekonomi klasik, oleh Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang dapat dicapai apabila negara tersebut mampu mewujudkan kebebasan perdagangan dan mengupayakan terjadinya akumulasi modal secara efisien.

Menurut Harberler (Salvatore, 2014), menyatakan bahwa *trade openness* atau kebijakan keterbukaan perdagangan yang diterapkan suatu negara dapat mendorong masuknya aliran modal asing dari *host country* ke negara *home*

country. Sedangkan menurut Hoang (2012) menyatakan bahwa dengan nilai *trade openness* yang tinggi, dapat menyebabkan *trade barrier* semakin menurun. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi investor asing untuk dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dari negara *host Country* untuk dapat melakukan *reexport*.

1.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian yang terkait dengan Pengaruh Perkembangan ICT, Persepsi Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Foreign Direct Investment di ASEAN. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan landasan atau rujukan dalam penelitian ini. beberapa peneliti tersebut diantaranya yaitu dilakukan oleh Amany Fakher (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Impact of Investment in ICT Sector on Foreign Direct Investment: Applied Study on Egypt*” menunjukkan hasil bahwa variabel ICT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDI.

Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Romanschii (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Impact of Information Technology on Foreign Direct Investment*” menunjukkan hasil bahwa variabel ICT berpengaruh positif dan signifikan, variabel korupsi berpengaruh positif, variabel *trade openness* berpengaruh positif dan signifikan dan tidak signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh William Gani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Political Risk, GDP, GNP, KURS, Wage Cost terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia*” menunjukkan hasil bahwa Political Risk, GDP, dan Wage cost berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Sementara, GNP, Kurs USD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap FDI.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afni Romadhona (2016) yang berjudul “*Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, Corruption Perception Index, dan Indeks Harga Saham Terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia Periode (2005-2014)*”, menunjukkan hasil secara simultan inflasi, PDB, IHS dan CPI memiliki pengaruh terhadap FDI. Secara parsial inflasi, PDB,

dan IHS tidak berpengaruh terhadap FDI. Sedangkan CPI memiliki efek positif dan berpengaruh signifikan terhadap FDI.

Amida Tri Septifany, R. Rustam Hidayat, Sri Sulasmiyati (2015) dalam penelitian mereka yang berjudul “*Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006- 2014)*” menunjukkan hasil variabel inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap PMA di Indonesia. Variabel Suku bunga SBI dan cadangan devisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA di Indonesia, sementara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMA di Indonesia.

Jonny Abdune (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Gross Domestic Product, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia periode 2003.Q1-2012.Q2*” menunjukkan hasil produk domestik bruto dan bunga memiliki efek positif yang signifikan, sementara variabel inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh pada investasi asing dalam jangka pendek ketika satu-satunya variabel yang mempengaruhi nilai tukar investasi asing.

Penelitian yang dilakukan oleh Rexsy S. Tambunan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Kurs, Inflasi, Libor dan PDB terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia*” menunjukkan apabila nilai tukar, libor, inflasi, PDB secara bersama-sama berpengaruh terhadap aliran masuk FDI. Namun, secara spasial PDB menunjukkan pengaruh yang besar terhadap aliran masuk FDI dibandingkan dengan Exchange Rate, inflasi maupun Libor

Fela Amzari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing di 6 negara ASEAN pada tahun 2010-2015*” hasil penelitian menunjukkan apabila inflasi dan GDP berpengaruh signifikan dan positif terhadap FDI. Sedangkan korupsi menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif terhadap FDI.

Gelora Seven Saragih, *et al* (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Indikator Makroekonomi dan Persepsi Korupsi terhadap Foreign*

Direct Investment (FDI) di Indonesia, Filipina dan Thailand” menunjukkan hasil bahwa variabel nilai tukar dan persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Claudia Tezia Januarita Putri, *et al* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Determinan Aliran Foreign Direct Investment di Indonesia (Pendekatan Model Dunning)*” menunjukkan hasil dimana; 1. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mampu menarik FDI di Indonesia. Oleh karena itu, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam mendorong aliran FDI yang masuk ke Indonesia. 2. Hasil Analisis ECM jangka pendek menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Akan tetapi hubungan aksi-reaksi dalam determinasi FDI di dominasi oleh perubahan GDP, inflasi, dan derajat keterbukaan ekonomi mendominasi pergerakan FDI dan terdapat satu variabel yang tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan FDI yaitu Infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Shafqat Mehmood Khan, Muhammad Ilyasb, and Abdul Rehman Chaudhary (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Impact of Trade Openness and Inflation on Foreign Direct Investment: A Panel Data Analysis of Selected South Asian Countries*” menunjukkan hasil bahwa trade openness, inflasi, GDP, dan volatilitas nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan nilai tukar riil dan Populasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Amany Fakher (2016)	The Impact of Investment in ICT Sector on Foreign Direct Investment: Applied Study on Egypt	FDI (Y) ICT (X1) GDP (X2) GOV (X3) INF (X4) IWL (X5) OPE (X6)	Ordinary Least Square	Hasil menunjukkan bahwa ICT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDI
2	Anastasia Romanschii (2016)	The Impact of Information Technology on Foreign Direct Investment	FDI (Y) ICT (X1) Education (X2) Tax (X3) Oppenes (X4) Rule of Law (X5) Corruption	Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Random Effect Model (REM)	Hasil menunjukkan bahwa variabel ICT berpengaruh positif dan signifikan, variabel korupsi berpengaruh positif dan tidak signifikan, trade openness berpengaruh positif dan signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.
3	William Gani (2014)	Pengaruh Political Risk, GDP, GNP, KURS, Wage Cost terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia	FDI (Y) Political Risk(X1) GDP (X2) GNP(X3) Kurs USD (X4) Wage Cost (X5)	Ordinary Least Square	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa atas pengaruh faktor - faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi FDI di Indonesia, yaitu Political Risk, GDP, GNP, Kurs USD, dan Wage cost. Hasil analisis menunjukkan bahwa Political Risk, GDP, dan Wage cost berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Sementara, GNP, Kurs USD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap FDI
4	Nurul Afni Romadhona (2016)	Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto,	FDI (Y) Inflasi (X1)	Ordinary Least	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Inflasi, Produk Domestik

		Corruption Perception Index, dan Indeks Harga Saham terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia Periode 2005-2014	PDB (X2) CPI (X3) IHS (X4)	Square	Bruto, Corruption Perception Index, dan Indeks Harga Saham Terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia Periode (2005-2014). Hasil penelitian menunjukkan hasil secara simultan inflasi, PDB, IHS dan CPI memiliki pengaruh terhadap FDI. Secara parsial inflasi, PDB, dan IHS tidak berpengaruh terhadap FDI. Sedangkan CPI memiliki efek positif dan berpengaruh signifikan terhadap FDI
5	Amida Tri Septifany, R. Rustam Hidayat, dan Sri Sulasmiyati (2015)	Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006-2014)	FDI (Y) Inflasi (X1) Suku Bunga SBI (X2) Exchange Rate (X3) Cadangan Devisa (X4)	Ordinary Least Square	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa terhadap PMA di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan data time series dari Bank Indonesia. Hasil penelitian ini adalah variabel inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap PMA di Indonesia. Variabel Suku bunga SBI dan cadangan devisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA di Indonesia, sementara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMA di Indonesia.

6	Jonny Abdune (2013)	Pengaruh Gross Domestic Product, Nilai Tukar, Suku bunga, dan Inflasi terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia periode 2003.Q1-2012.Q2	PMA (Y) GDP (X1) Nilai Tukar (X2) Suku Bunga (X3) Inflasi (X4)	Ordinary Least Square	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto, nilai tukar, suku bunga dan inflasi pada modal asing di Indonesia penanaman periode 2003.Q1 - 2012.Q2. Model analisis dalam penelitian ini menggunakan tes VECM diperkirakan untuk melihat efek variabel ini pada aliran PMA di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek pada masaitu. Hasil penelitian menunjukkan produk domestik bruto dan Suku bunga memiliki efek positif yang signifikan, sementara variabel inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh</p> <p>pada PMA dalam jangka pendek</p>
7	Rexsy S. Tambunan (2015)	Pengaruh Kurs, Inflasi, Libor dan PDB terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia	FDI (Y) Exchange Rate (X1) Inflasi (X2) Libor (X3) GDP (X4)	Ordinary Least Square	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi aliran masuk FDI ke Indonesia dengan periode waktu 1998-2013. Penelitian ini menggunakan analisis data time series. Hasil penelitian menunjukkan apabila nilai tukar, Libor, Inflasi, PDB secara bersama-sama berpengaruh terhadap aliran masuk FDI. Namun secara sendiri-sendiri,</p> <p>PDB menunjukkan pengaruh yang besar terhadap aliran masuk FDI dibandingkan dengan Exchange Rate, inflasi</p>

					maupun libor
8	Fela Amzari (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing di 6 negara ASEAN pada 2010-2015	FDI (Y) Inflasi (X1) Korupsi (X2) GDP (X3)	Pooled Least Square	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Corruption Perception Index (CPI) terhadap Foreign Direct Investmen (FDI). Jenis penelitian ini adalah Explanatory research yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan apabila Inflasi dan GDP memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap FDI. Sedangkan Korupsi menunjukkan hasil berpengaruh signifikan dan negatif terhadap FDI.
9	Gelora Seven Saragih, et al (2019)	Pengaruh Indikator Makroekonomi dan Persepsi Korupsi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia, Filipina dan Thailand	FDI (Y) INF (X1) ER (X2) CPI (X3)	Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect Model	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel makroekonomi, yakni inflasi dan nilai tukar dengan persepsi korupsi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia, Filipina dan Thailand. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel nilai tukar dan persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
10	Claudia Tezia Januarita Putri dan Regina	Determinan Aliran Foreign Direct Investment di Indonesia	FDI (Y) GDP (X1) INF (X2)	Error Correction Model (ECM)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi, Nilai Tukar, <i>Trade Openness</i> , dan Infrastruktur

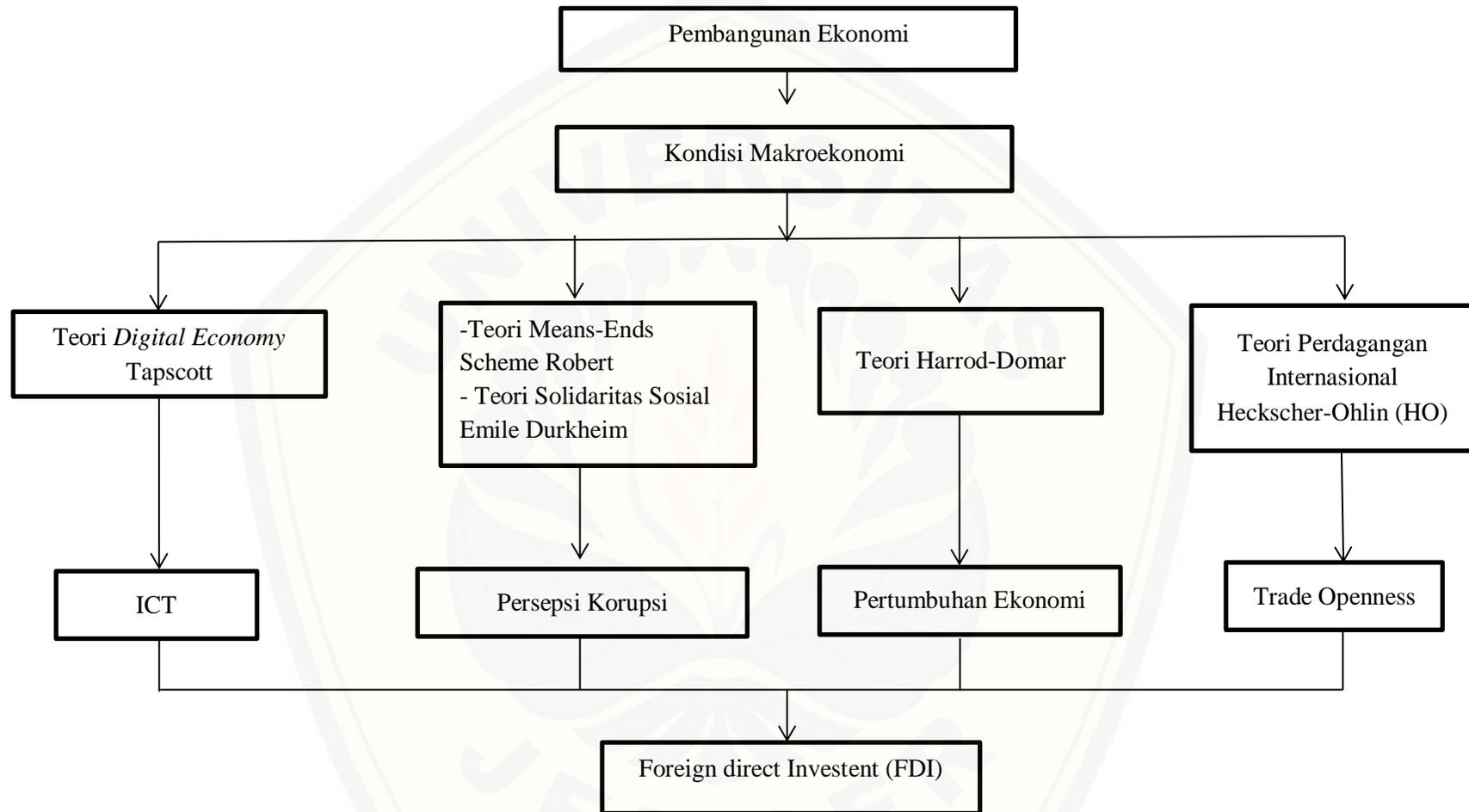
Niken Wilantari (2016)	(Pendekatan Model Dunning)	RER (X3) TO (X4) INFR (X5)	terhadap Foreign Direct Investment (FDI). hasil dari penelitian ini adalah:		
			<p>1. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mampu menarik FDI di Indonesia. Oleh karena itu, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam mendorong aliran FDI yang masuk ke Indonesia.</p> <p>2. Hasil Analisis ECM jangka pendek menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Akan tetapi hubungan aksi-reaksi dalam determinasi FDI di dominasi oleh perubahan GDP, infasi, dan derajat keterbukaan ekonomi mendominasi pergerakan FDI dan terdapat satu variabel yang tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan FDI yaitu Infrastruktur.</p>		
11	Shafqat Mehmood Khan, Muhammad Ilyasb, and Abdul Rehman Chaudhary (2018)	<i>Impact of Trade Openness and Inflation on Foreign Direct Investment: A Panel Data Analysis of Selected South Asian Countries</i>	FDI (Y) ERV (X1) INF (X2) TOP (X3) RERG (X4) POP (X5) RGDP (X6)	Analisis regresi data panel dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa trade openness, inflasi, GDP, dan volatilitas nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan nilai tukar riil dan Populasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI.

1.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual berfungsi sebagai pedoman serta fokus penelitian. Kerangka konseptual menunjukkan konstruksi teori dalam penelitian serta mempunyai hubungan yang sebangun dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan Perkembangan ICT, Persepsi Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* terhadap FDI di ASEAN.

Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura sebagai negara-negara terdepan di kawasan Asia Tenggara dalam mengikuti era globalisasi yang sampai saat ini terus meningkatkan produktivitas dengan keterbukaan ekonominya. Kondisi tersebut sejalan dengan Todaro dan Smith (2006) yang menyatakan bahwa globalisasi dari segi ekonomi, menjadikan keterbukaan perekonomian setiap negara akan meningkat tinggi terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, serta investasi asing langsung atau FDI. upaya dalam menjalankan keterbukaan ekonominya, negara-negara tersebut menjadikan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai pendukung dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi negara.

Variabel yang akan diteliti meliputi perkembangan ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* yang akan mempengaruhi FDI di ASEAN. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan mengenai hubungan variabel dependen (Y) yaitu Investasi Asing (FDI) dengan variabel (X) yaitu, ICT, Persepsi Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* kemudian dikembangkan menjadi kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

1.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan dengan teori maupun penelitian terdahulu yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Hipotesis terdiri dari hipotesis nol (0) dan Hipotesis alternatif (a) yang dimiliki dua kemungkinan yakni diterima atau ditolak jika terdapat suatu penyimpangan dari fakta sebelumnya. Dengan menggunakan objek penelitian ASEAN-6 yang dikarenakan ASEAN-6 merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang cukup pesat dengan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI). Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) berpengaruh positif terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura.
2. Persepsi Korupsi berpengaruh positif terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura.
4. Trade Openness berpengaruh positif terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura.
5. Secara umum, ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi dan trade openness secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Singapura.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Dimana *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai variabel dependen ICT, Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan *Trade Openness* sebagai variabel Independen.

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahun 2010 sampai tahun 2018 menggunakan data panel, dengan menggunakan data tahunan. Adapun data yang digunakan adalah data *Foreign Direct Investment* yang masuk ke negara-negara di ASEAN, data Presentase Pengguna Internet sebagai indikator ICT, *Corruption Perception Index* (CPI) sebagai indikator dari Persepsi Korupsi, data *Gross Domestic Product* sebagai Indikator dari pertumbuhan ekonomi dan data rasio perdagangan internasional sebagai indikator dari *trade openness*.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian, dengan kata lain metode penelitian merupakan petunjuk bagi peneliti bagaimana penelitian akan dilakukan. Metode sendiri mengandung makna prosedur dan tata cara melakukan melakukan pengujian data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif digunakan apabila penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa atau suatu fenomena yang terjadi dalam bentuk angka-angka yang mengandung makna tertentu. Metode tersebut dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan *trade openness* terhadap *Foreign Direct Investment* dengan mendeskripsikan hasil dari pengolahan data menggunakan E-views.

3.3 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu negara-negara yang masuk dalam kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Pemilihan negara-negara ASEAN sebagai populasi karena ASEAN merupakan salah satu kawasan yang menjadi penerima aliran dana investasi asing langsung yang cukup tinggi.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan sampel berdasarkan pada kemudahan (*Convenience Sampling*). Metode tersebut memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti, yaitu data sekunder yang diperoleh dari *website*. Selain itu, juga menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu menentukan sampel dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan kelas atau strata, random tetapi berdasarkan pada adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010). Pemilihan Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Singapura sebagai sampel penelitian, karena negara-negara tersebut kategori sebagai negara yang terdepan di kawasan ASEAN dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonominya melalui FDI.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data adalah informasi atau keterangan yang bisa menjelaskan fakta yang diolah dari bahan mentah secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data diperlukan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mencapai hasil penelitian. Adapun beberapa jenis data menurut sumber dan cara pengumpulannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dicari secara langsung oleh peneliti. Cara untuk memperoleh data primer yaitu dengan melalui wawancara, jajak pendapat, ataupun elakukan observasi pada suatu proyek atau peristiwa. Kelebihan dari data primer adalah tingkat akurasi data yang dihasilkan terjamin dan terhindar dari unsur-unsur kebohongan. Karena data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dilihat atau didengar langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Namun data primer juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan dana yang terbilang cukup besar, karena peneliti harus melakukan

penelitian atau observasi secara langsung pada sumber yang dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer, dimana data ini cara memperolehnya tidak harus terjun langsung ke sumber aslinya. Namun, data sekunder diperoleh dari sumber kedua. Pada umumnya, data ini diperoleh dari lembaga atau instansi, atau organisasi terkait yang tidak atau mempublikasikan data secara umum melalui buku, literatur, dokumen, arsip, website, atau sumber-sumber lainnya. Kelebihan dari data sekunder adalah dalam memperoleh data tersebut membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat serta biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan data primer. Namun, karena data yang didapat bukan dari sumber aslinya langsung, maka tingkat akurasi data lebih rendah, jadi dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank dan Transparency International. Dimana data yang diambil merupakan data tahunan dari tahun 2010 hingga 2018.

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu ditentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan, karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan utuuk mendapatkan data atau informasi yang yang berkaitan dengan penelitian dengan melihat laporan tertulis baik yang berupa angka maupun keterangan. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui buku literatur terkait dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3.5 Desain Penelitian

Desaian penelitian adalah penjelasan mengenai bagaimana arah dari penelitian mulai dari awal sampai hasil. Desain penelitian dalam dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai metodologi penelitian yang menggunakan metode penyelesaian dalam pengambilan suatu kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam menjelaskan analisis stokasi pengaruh Perkembangan ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura dengan menggunakan metode *Panel Least Square* (PLS). Metode PLS memberikan penjelasan terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. proses pengujian menggunakan metode PLS diawali dengan pembentukan rekontruksi yang digunakan dalam model estimasi PLS. Rekontruksi tersebut dibentuk melalui fenomena ekonomi dan fakta empiris, dimana tujuannya adalah untuk memberikan batasan dalam hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. setelah terbentuk rekontruksi maka kemudian akan dilakukan dengan pembentukan Model *Panel Least Square*.

Setelah pembentukan Model *Panel Least Square*, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian pra estimasi. Tujuan dari pengujian pra estimasi adalah untuk melihat Model *Panel Least Square* telah memnuhi syarat untuk diestimasi atau tidak. Uji pra estimasi diawali dengan estimasi data panel. Estimasi data panel sendiri terbagi menjadi tiga, diantaranya: *Common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Kemudian setelah melewati estimasi tersebut, langkah selanjutnya adalah menggunakan pengujian yang digunakan untuk melihat alat yang digunakan dalam regresi. Ketiga uji tersebut adalah diantaranya: Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrangge Multiplier. kemudian tahap selanjutnya adalah dengan melakukan uji statistik yang diantaranya: Uji t, Uji F, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas. Tahap terakhir yang harus dilalui adalah Uji stabilitas model, diimana dari uji tersebut dapat dilihat dan disimpulkan variabel mana yang memiliki pengaruh terbaik jika diterapkan dalam penelitian ini.

3.6 Spesifikasi Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model *Panel Least Square* Kemudian model persamaan yang akan diestimasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$FDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 ICT_{it} + \beta_2 CPI_{it} + \beta_3 GDP_{it} + \beta_4 TO_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

ICT_{it}	= Perkembangan ICT di negara i pada periode t
CPI_{it}	= Skor CPI di negara i pada periode t
GDP_{it}	= Nilai GDP di negara i pada periode t
TO_{it}	= rasio Trade Openness i pada periode t
β_0	= Intercept/Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
ϵ_{it}	= error term di negara i pada taun t

Dalam menganalisis model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan beberapa macam pendekatan, diantaranya yaitu:

1. Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS)

Model ini merupakan model regresi yang paling sederhana dibandingkan dua model regresi yang lain. Karena model ini hanya menggabungkan data time series dan cross-section (Widarjono, 2009). Dalam model PLS, perilaku individu diasumsikan sama dalam berbagai kurun waktu, sebab dimensi waktu ataupun individu tidak diperhatikan dalam model ini.

2. Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)

Menurut Gujarati (2012), menjelaskan apabila individu-individu (*cross-section*) dalam model ini memiliki intersepnya masing-masing. Model ini juga sering disebut sebagai teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Karena, untuk mengestimasi data panel, *Fixed Effect Model* menggunakan teknik variable dummy untuk melihat perbedaan intersep antar individu (Kuncoro, 2012).

3. Pendekatan *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) dikenal sebagai metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menghitung error dari model regresi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Perbedaan dengan *Fixed Effect Model*

(FEM) adalah, apabila di FEM perbedaan antar individu atau waktu digambarkan melalui intercept, maka pada Random Effect Model (REM) perbedaan tersebut diakomodir melalui error. Keuntungan menggunakan random effect model yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Metode ini untuk memperhitungkan bahwa error berkorelasi sepanjang time series dan cross section (Suliyanto, 2011)

4 Pengujian Model

Pemilihan model yang paling tepat untuk mengelola data panel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan statistik. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh dugaan yang tepat dan efisien. Pertimbangan statistic yang dimaksud melalui pengujian, untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat tiga metode yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut (Gujarati, 2004) :

a. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk mengetahui *Pooled Least Square* (PLS) Model atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan dalam estimasi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \textit{Pooled Least Square Model}$$

$$H_1 : \textit{Fixed Effect Model}$$

Jika nilai probabilitas (P-Value) lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka menolak H_0 , artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), dan sebaliknya jika H_0 diterima, berarti *Pooled Least Square* (PLS) Model yang dipakai dan dianalisis.

b. Uji Hausman

Keputusan penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dapat ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan Chi-Square Statistik sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

$$H_0 : \textit{Random Effect Model}$$

$$H_1 : \textit{Fixed Effect Model}$$

Jika nilai probabilitas (P-Value) lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka menolak H_0 , artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), dan sebaliknya jika H_0 diterima, berarti *Random Effect Model* (REM) yang dipakai dan dianalisis.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini untuk menentukan apakah model Pooled Least Square atau Random Effect Model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Pooled Least Square

H_1 : Model Random Effect

Dilihat dari nilai Breusch-pagan. Jika nilai Breusch-pagan $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah random effect model (REM) dan apabila nilai Breusch-pagan $> \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_0 diterima, sehingga model panel yang baik digunakan adalah pooled least square (PLS). Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

5 Uji Statistik

Sedangkan pada uji statistik terdapat beberapa uji, antara lain :

1. Uji t-statistik.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$. Langkah-langkah pengujian hipotesis parsial dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas nilai thitung $>$ ttabel maka H_0 ditolak atau menerima H_1 , dan jika probabilitas nilai thitung $<$ ttabel maka H_0 diterima atau menolak H_1 .

2. Uji F-statistik.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya. Jika nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 5% maka variabel independen akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah- langkah pengujian hipotesis simultan dengan menggunakan uji f adalah sebagai berikut :

H_0 :Semua variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

H_1 :Semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

Jika nilai probabilitas F-statistik $< \alpha$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 , dan jika nilai probabilitas F-statistik $> \alpha$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 .

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol artinya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen minim. Sedangkan nilai R^2 yang besar atau mendekati satu artinya variabel independen mampu menjelaskan hampir keseluruhan perubahan pada variabel dependen.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik seringkali disebut juga sebagai uji diagnostik karena uji ini bertujuan untuk mengistimasi model dari setiap variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen (Nachrowi dan Usman, 2006:185). Model regresi linier dengan metode estimasi *Ordinary Least Square* merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang merupakan estimator terbaik, atau yang biasa disebut dengan istilah BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*). Untuk dapat melihat kondisi tersebut maka pengujian yang harus dilakukan antara lain, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi (Wardhono, 2004:24).

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan apabila regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas, sehingga pengjiannya tidak bisa dilakukan. Maka kemudian karena dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka uji multikolinieritas dilakukan pada penelitian ini. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Karena dalam penelitian ini, menggunakan lebih dari dua variabel penjelas (independen), maka pengujian dengan menggunakan korelasi antarvariabel tidak akan memberikan panduan yang sempurna bagi keberadaan multikolinieritas (Gujarati dan Porter, 2012:429). Oleh karena itu, dalam penelitian ini pendeteksian atau pengujian keberadaan multikolinieritas menggunakan regresi auxiliary (penyokong) dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan aturan baku Klein.

Uji auxiliary merupakan regresi yang dilakukan pada setiap variabel X_j terhadap variabel X lainnya dan menghitung nilai R^2 nya. Regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel bebas yang bersama-sama mempengaruhi satu variabel bebas yang lain. Apabila kita memiliki persamaan regresi dengan tiga variabel independen, maka kita harus melakukan regresi sebanyak tiga kali pula, dengan masing-masing analisis menggunakan satu variabel independen sebagai variabel dependen (Gujarati dan Porter, 2012:430). Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. H_0 : terjadi multikolinieritas antar variabel bebas
- b. H_1 : tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah aturan baku Klein (Gujarati dan Porter, 2012:431), yaitu sebagai berikut :

- a. Jika nilai R^2 regresi auxiliary $<$ R^2 regresi keseluruhan, maka H_0 ditolak, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas.

- b. Jika nilai R^2 regresi auxiliary $>$ R^2 regresi keseluruhan, maka H_0 diterima, yang berarti terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Data panel adalah gabungan dari data time series dan cross section, namun lebih berbersifat ke data cross section. Hal ini karena, pada data panel periode waktunya berulang, berbeda dengan data time series yang periode waktunya tidak berulang, atau dengan kata lain, pada data panel time series-nya bukan time series murni. Karena data panel lebih bersifat ke data cross section, dimana pada data cross section masalah yang sering terjadi ialah adanya heteroskedastisitas, maka dalam penelitian ini uji Heteroskedastisitas perlu dilakukan (Gujarati, 2004: 116).

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2014).

Menurut Suliyanto (2011) model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi syarat tidak terjadinya heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yang terjadi pada data, dapat dilakukan dengan Uji Glesjer, yakni dengan meregresikan nilai absolut residualnya. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2011) :

H_0 : tidak terjadi heteroskedastisitas pada sebaran data

H_1 : terjadi heteroskedastisitas pada sebaran data

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Probability $<$ α (5%), maka H_0 ditolak, yang berarti terjadi heteroskedastisitas pada sebaran data.
- b. Jika nilai Probability $>$ α (5%), maka H_0 diterima, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada sebaran data.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator atau Estimator Terbaik, Linier, dan Tidak Bias), dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Namun demikian, karena penggunaan uji F dan uji t mengharuskan faktor kesalahan mengikuti distribusi normal (Gujarati dan Porter, 2012:169), maka uji Normalitas tetap dilakukan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel, residual berdistribusi normal atau tidak. Jadi, dalam model regresi data panel asumsi normalitas pada regresi linier OLS dilakukan pada residualnya bukan pada variabelnya. Model regresi yang baik adalah residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam data panel dapat diketahui dengan membandingkan nilai Probability. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2011):

H_0 : residual berdistribusi normal

H_1 : residual tidak berdistribusi normal

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Probability $< \alpha$ (5%), maka H_0 ditolak, yang berarti residual tidak Berdistribusi normal
- b. Jika nilai Probability $> \alpha$ (5%), maka H_0 diterima, yang berarti residual berdistribusi normal.

Selain berdasarkan pada pedoman di atas, menurut Gujarati dan Porter (2012:169) dalam bukunya, bahwa untuk sebuah variabel yang terdistribusi secara normal, skewness atau kemiringan (ukuran simetri) seharusnya bernilai 0 dan kurtosis atau keruncingan (mengukur seberapa tinggi atau pendeknya kurva distribusi normal) dari kurva seharusnya bernilai 3.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dengan demikian, uji autokorelasi hanya dapat dilakukan pada data time series (runtut waktu), sebab yang dimaksud dengan autokorelasi adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan data cross section maupun data panel, tidak perlu melakukan uji autokorelasi.

Pengujian autokorelasi pada data yang bukan time series, baik data cross section maupun data panel, hanya akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Hal ini karena, khususnya pada data panel, walaupun ada data runtut waktu (time series), namun bukan merupakan time series murni (waktu yang tidak berulang). Oleh sebab itu, uji Autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa untuk variabel independen tertentu tidak ada autokorelasi atau korelasi seri di antara faktor gangguan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa dalam penelitian ini hanya melakukan tiga pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Variable yang digunakan antara lain satu variabel terikat (*dependent variable*) dan tiga variabel bebas (*Independent variable*). Variabel terikat yang digunakan adalah FDI di ASEAN-6 dan variabel bebas yang digunakan Perkembangan ICT, persepsi korupsi, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun diefinisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Foreign Direct Investment* (FDI)

Foreign Direct Investment merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan negara asing di dalam negara tujuan investasi dengan tujuan untuk menambah pangsa pasar serta mendapatkan keuntungan karena efisiensi sumberdaya yang didapat di negara tujuan FDI. data yang digunakan adalah

jumlah aliran masuk FDI atau FDI *inflow* setiap tahunnya di ASEAN-6 pada tahun 2010-2018 dengan menggunakan Billion US\$ Dollars yang didapat dari data *World Bank*.

2. *Information and Communication Technology* (ICT)

Information and Communication Technology (ICT) merupakan teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi berupa data, suara, dan video, dimana teknologi tersebut mampu meningkatkan keuntungan perusahaan karena dapat digunakan untuk mengontrol *value* dan tingkat kompetitif perusahaan, karena dengan ICT mampu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, keunggulan dalam membagi pasar dengan para kompetitor, mengurangi biaya operasi, serta efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan. data yang digunakan adalah presentase penduduk pengguna internet setiap tahunnya di ASEAN-6 pada tahun 2010-2018 dengan menggunakan persen (%) yang bersumber dari data *World Bank*..

3. Persepsi Korupsi

Korupsi adalah perilaku ketidak jujuran, termasuk perilaku para pejabat di sektor publik, dimana para politisi dan pelayan masyarakat memperkaya diri sendiri secara tidak tepat dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Adapun data yang digunakan adalah skor *Corruption Perception Index* (CPI) setiap tahunnya di ASEAN-6 tahun 2010-2018 yang bersumber dari data *Transparency International*.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan nilai dari produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan suatu negara dalam satu periode waktu, dimana umumnya satu tahun. Data yang digunakan adalah nilai pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) setiap tahunnya dari negara ASEAN-6 pada tahun 2010-2018 dengan menggunakan Billion US\$ Dollars yang bersumber dari data *World Bank*..

5. Trade Openness

Trade Openness trade openness adalah rasio dari nilai ekspor ditambah dengan impor per GDP (*Gross Domestic Product*) yang merupakan indikator derajat hubungan perekonomian suatu negara terhadap negara lainnya. Data yang

digunakan merupakan data rasio dari jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari GDP yang dinyatakan dengan *Trade (% of GDP)* setiap tahunnya dari negara ASEAN pada tahun 2010-2018 yang bersumber dari data *World Bank*.



BAB 5 PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* terhadap aliran masuk FDI di enam negara di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina dan Singapura. Bab 5 memaparkan ulasan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran. Bagian pertama merupakan kesimpulan dari keseluruhan penjelasan baik yang berasal dari variabel dependen maupun dalam variabel independen yang terdapat dalam penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai variabel ICT, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi dan *trade openness* yang mempengaruhi FDI di ASEAN dari tahun 2010-2018 diperoleh kesimpulan:

1. *Information and Communication Technology* (ICT) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap FDI di ASEAN. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ICT akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan FDI di ASEAN.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di ASEAN. Hal ini berarti semakin tinggi skor persepsi korupsi yang berarti semakin rendahnya tingkat korupsi akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan FDI di ASEAN.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di ASEAN. Hal tersebut berarti bahwa semakin tingginya nilai pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan FDI di ASEAN.
4. *Trade openness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan FDI di ASEAN.

5.2 SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Meskipun hasil menunjukkan tidak signifikan, namun *Information and Communication Technology* (ICT) mampu memberikan pengaruh positif. Di era Revolusi Industri 4.0 dimana internet telah menjalar ke segala sendi kehidupan manusia atau dikenal dengan IoT (*Internet of Things*). Sehingga, kemudian bermunculan startup-startup berbasis aplikasi (online) yang mampu menarik banyak modal asing dan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Misalnya, Go-jek, Grab, Traveloka dan lain-lain. Maka dari itu, kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah negara ASEAN yaitu, pemerintah sebaiknya meningkatkan inklusivitas pembangunan infrastruktur ICT agar akses internet dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah pelosok dengan cara membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi *broadband* (pita lebar) yang merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah dalam suatu negara, bahkan untuk negara kepulauan sekalipun. Selain pemerintah, dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi juga harus mampu merespon perkembangan teknologi ICT dengan cara melakukan berbagai penyesuaian, seperti program studi yang harus relevan, sistem pembelajaran dan fasilitas yang memadai. Karena selain infrastruktur fisik, kemampuan sumberdaya manusia juga harus ditingkatkan.
2. Korupsi memang masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi pemerintah negara berkembang. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi laju FDI. Untuk itu, koruptor harus dihukum berat bahkan bila perlu hukuman mati. Caranya adalah dengan memperkuat independensi serta wewenang dari lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut harus bebas dari segala hal yang berbau politik, agar tidak terjadi intervensi-intervensi dari pihak luar

ketika akan menindak para pelaku korupsi. Sehingga angka kasus korupsi akan terus berkurang dari tahun-ke tahun.

3. Untuk meningkatkan FDI, diharapkan setiap negara memiliki strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN adalah kurangnya jumlah pengusaha sehingga tingkat pengangguran masih tergolong tinggi. Langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan cara menstimulus agar jumlah pengusaha mampu meningkat dengan signifikan. Kebijakan yang bisa diterapkan adalah; pertama, mempermudah izin berusaha artinya administrasi harus lebih simpel dan alur birokrasi yang harus dipersingkat. Kedua, kemudahan dalam mencari modal, dengan diterapkannya kebijakan kemudahan dalam mengambil kredit usaha serta bunga kredit yang tidak terlalu tinggi.
4. Tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terbukti mampu menarik minat investor untuk berinvestasi. Sejak ditetapkannya perjanjian AFTA (*Asean Free Trade Area*) pada tahun 1992 pada KTT (konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN di Singapura, tingkat keterbukaan asean meningkat secara drastis sehingga mampu meningkatkan investasi ASEAN. Terlebih dengan diterapkannya perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 semakin menjadikan kawasan ASEAN sebagai opsi utama bagi investor untuk menanamkan FDI. namun, perlu diketahui bahwa sekarang sedang musim yang namanya perang dagang, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Tiongkok sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang merelokasi pabriknya ke negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam karena dianggap kedua negara tersebut yang paling ramah dan menguntungkan bagi investor. maka dari itu negara-negara ASEAN yang lain juga harus siap siaga dengan menjadi negara yang menarik bagi investor dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan seperti penyediaan lahan khusus, ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. serta pajak yang tidak terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdune, Jonny. “Pengaruh Gross Domestic Product, Nilai tukar, Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Periode 2003.Q1-2012.Q2”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Aditjandra, George Junus. “Good Governance in Africa”, Zed Book, New York, 2002.
- Amzari, Fela. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di 6 Negara ASEAN Pada Tahun 2010-2015”, Skripsi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Angha Nader. 2002. Teori Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual. Jakarta: Serambi.
- Anoraga, Panji. 1995. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta, Dunia Pustaka Jaya.
- Arifin, Sjamsul dkk. “Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global (MEA 2015)”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Arikunto, S. “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik”. (Edisi Revisi). Rieka Cipta, Jakarta, 2010.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Bardhan, P. “Corruption and Development: a Review of Issues”, *Journal of Economic Literature*. Vol. 35: 1320-1346, 1997.
- Black, Henry Campbell. “Black’s Law Dictionary Centennial Sixth Edition”, St. Paul, Minn: West Publishing co, Edisi 7/Jilid II, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Claudia, Niken. 2016., *Determinan Aliran Foreign Direct Investment di Indonesia (Pendekatan Model Dunning)* *journal.runojoyo.ac.id*, Vol. 11, No. 2
- Don Tapscott, *The Digital Economic – Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, (2015), McGraw-Hill Education.
- Febriana, Asri dan Muqorobbin, Masyhudi. “Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15 Nomor 2*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

- Gani, A., Sharma, B. (2003). "The Effects of Information Technology Achievement and Diffusion on Foreign Direct Investment", *Perspectives on Global Development and Technology*, 2 (2), 161-178.
- Ghozali, Iman. 2014. *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar N. "Basic Econometrics (4th Edition)", McGraw-Hill, New York, 2003.
- Gujarati, Damodar N. "Dasar-Dasar Ekonometrika." Terjemahan, Buku ke 2, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Habib, Mohsin dan Zurawicki, Leon. "Corruption and Foreign Direct Investment", *Journal of International Business Studies* Vol.33, No.2, Palgrave Macmillan Journals, 2002.
- Handoyo Eko. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: Widyakarya Press.
- Hermann, Mario Pentek, Boris Otto, Design Principles for Industries 4.0 Scenario: A Literature Review,(2016),49thHawaii International Conference on System Sciences.
- Hoang, Hong Hiep. (2012). Foreign Direct Investment in Shoutheast Asia; Determinants and Spatial Distributions. *Working Paper Series No. 2012/30 Centre of Studies and Research on International Development (CERDI) University of Auvergne, CNRS*.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180912081912-532329488/membedah-ekonomi-vietnam-tuan-rumah-world-economic-forum>
- Huntington, S. "Political Order in Changing Societies", New Haven: Yale University Press, 1968. IMF Staff Paper No. 51 No. 1, Washington DC, 2004.
- International Telecommuication Union. 2015. "Measuring the InformationSocietyReport"<https://www.itu.int/en/ITU/StatisticsDocuments/publication/misr2015/MISR2015-ES-E.pdf> diakses pada 15 Januari 2018.
- International Telecommunicaton Union (ITU). <http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx> diakses pada Januari 2018.
- Jhingan, M.L. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan/M.L Jhingan; penerjemah D. Guritno-ed. 1,-Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI 2008. <https://www.kominfo.go.id/> diakses pada Desember 2019.

- Ko, K.W. (2007). "Internet externalities and location of foreign direct investment: A comparison between developed and developing countries", *Information Economics and Policy*. 19 (1), 1-23.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi", Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006
- Kurniati, Y., Prasmuko, A., & Yanfitri. "Determinan FDI", Bank Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2007.
- Leff, N. "Economic Development through Bureaucratic Corruption", *American Behavioral Scientist*. Vol. 82: 337-41, 1964.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi ke-6. Jakarta: Erlangga.
- Mauro, P. "The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure: A Cross-Sectional Analysis", in *Corruption and the Global Economy*, Ed. by Kimberly Ann Elliott (Washington, D.C., USA), 1997.
- Mauro. "Corruption and Growth", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110: 681- 712, 1995.
- Mauro."The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth."
- McKinsey, *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*, (2016).
- Nachrowi, D & Usman, Harius. 2006. *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nawatmi, Sri. "Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi – Studi Empiris 33 Provinsi Di Indonesia", *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Mei, Hal: 66 – 81, 2013.
- Nayak, Dinkar & Choudury, Rahul N. 2014. *A Selective Review of Foreign Direct Investment Theories*, ARTNet Working Paper Series No. 143. Bangkok: ESCAP.
- Nonnemberg, M.B. & Cardoso de Mendonça, M.J. "The Determinants Of Foreign Direct Investment In Developing Countries", ANPEC, 2004.
- OECD (2010). "Business Climate Development Strategy. MENA-OECD investment Program: EGYPT", Dimension III-2-Human Capital.
- Pambudi, A. Eka & Hakim, Luman. 2013. *Perbandingan Faktor Ekonomi Makro dan Karakteristik Negara Sebagai Determinan FDI di ASEAN 5 dan China Periode 1998-2009*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol, 5, No. 1. Fakultas Ekonomi Sebelas Maret.

- Paul M. Romer *The Journal of Economic Perspectives* Vol. 8, No. 1 (Winter, 1994), pp. 3-22.
- Purwanto, Tri. (2011). Skripsi Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara ASEAN-3 (tidak dipublikasikan).
- Riduwan dan Kuncoro, Engkos Achmad, “Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analyst (Analisis Jalur)”, Alfabetas, Bandung, 2012.
- Romadhona, Nurul Afni. “Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, Corruption Perception Index, dan Indeks Harga Saham Terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia Periode (2005-2014)”, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2016.
- Salvatore, Dominick. 2014. *Ekonomi Internasional Jilid 1*. Jakarta; Salemba Empat.
- Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung Di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol 4, No 1, pp.17-35 (Mei 2002).
- Septifany, Amida Tri. Hidayat, R. Rustam. Sulasmiyati, Sri. “Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006-2014)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan”, CV Alfabeta, Bandung, 2011
- Sukirno, Sadono. “Pengantar Teori Makroekonomi”, Edisi ke 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sukirno,. “Pengantar Teori Makroekonomi”, Edisi ke 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sukirno. “Pengantar Teori Makroekonomi”, Edisi ke 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suliyanto. “Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS”, ANDI, Yogyakarta, 2011.
- Susanto, Joko. 2012. *Determinan Penanaman Modal Asing Langsung di ASEAN*, JRMB, Vol. 7, No. 1. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UPN Veteran.
- Suwarno. “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing pada Industri Manufaktur di Jawa Timur”, *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 8(1): h: 50-57, 2008.

- Thirafi, Muhammad Aulia Zul. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur dan Kepadatan Penduduk terhadap Penanaman Modal Asing di Kabupaten Kendal", *Economics Development Analysis Journal*, 2(1): h:1-9, 2013
- Todaro, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", Edisi Bahasa Indonesia, 2000.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen. "Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Todaro, "Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)", Erlangga, Jakarta, 2006.
- Transparency International. "Transparency International Bribe Payers Index (BPI) 2010", Transparency International, Berlin, 2010.
- Udo, Eli A & Obiora, Isitua K. 2006. *Determinants of Foreign Direct Investment and Economic Growth in the West African Monetary Zone: A System Aqutions Approach*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics)
- United Nations Conference on Trade and Development . 2017. World Investment Report. "Investment and the Digital Economy". http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf diakses pada Desember 2019.
- Wadhawa, Karvita. 2011., *Foreign Direct Investment Into Developing Asian Countries: The Role of Market Seeking, Resource Seeking and Efficiency Seeking International Journal of Business and Management*, Vol. 6, NO. 11, 219-226.
- Wardhono, Adhitya. 2004. *Mengenal Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*. Universitas Jember. Fakultas Ekonomi.
- Widarjono, Agus. "Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya." Edisi Ketiga. EKONISKA, Yogyakarta, 2009.
- Winantyo, R., Saputra, Rahmat Dwi, Fitriani, Sri., Morena, Ria., dkk. "Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015): Mempercepat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

DATA FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT), KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN

1. Foreign Direct Investment (FDI) dalam Miliar US\$

Negara	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filipina	Singapura
2010	10.92	10.89	14.75	1.07	1.07	55.32
2011	12.28	15.12	2.47	2.01	2.01	49.16
2012	14.52	8.90	12.90	3.22	3.22	55.31
2013	14.94	11.30	15.94	3.74	3.74	64.39
2014	17.40	10.62	4.98	5.74	5.74	68.70
2015	21.98	9.86	8.93	5.64	5.64	69.78
2016	25.45	13.47	2.81	8.28	8.28	73.55
2017	32.29	9.37	8.05	10.26	10.26	94.81
2018	39.79	8.57	13.25	9.80	9.80	82.04

Sumber: World Bank, 2019

2. Information and Communication Technology (ICT) dalam persen

Negara	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filipina	Singapura
2010	10.92	56.30	22.40	30.65	25.00	71.00
2011	12.28	61.00	23.67	35.07	29.00	71.00
2012	14.52	65.80	26.46	36.80	36.24	72.00
2013	14.94	57.06	28.94	38.50	48.10	80.90
2014	17.40	63.67	34.89	41.00	49.60	79.03
2015	21.98	71.06	39.32	45.00	36.00	79.01
2016	25.45	78.79	47.51	53.00	55.50	84.45
2017	32.29	80.14	52.89	58.14	60.06	84.45
2018	39.79	81.20	56.82	70.35	64.98	88.17

Sumber: World Bank, 2020

3. Corruption Perception Index (CPI) dalam Skor

Negara	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filipina	Singapura
2010	10.92	56.30	22.40	30.65	25.00	71.00
2011	12.28	61.00	23.67	35.07	29.00	71.00
2012	14.52	65.80	26.46	36.80	36.24	72.00
2013	14.94	57.06	28.94	38.50	48.10	80.90
2014	17.40	63.67	34.89	41.00	49.60	79.03
2015	21.98	71.06	39.32	45.00	36.00	79.01
2016	25.45	78.79	47.51	53.00	55.50	84.45
2017	32.29	80.14	52.89	58.14	60.06	84.45
2018	39.79	81.20	56.82	70.35	64.98	88.17

Sumber: Transparency International, 2019

4. Gross Domestic Product (GDP) dalam Milliar US\$

Negara	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filipina	Singapura
2010	755.09	255.02	314.11	115.93	199.59	239.81
2011	892.97	297.95	370.82	135.54	224.14	279.35
2012	917.87	314.44	397.56	155.82	250.09	295.09
2013	912.52	323.28	420.33	171.22	271.84	307.58
2014	890.82	338.06	407.34	186.21	284.59	314.85
2015	860.85	296.64	401.30	193.24	292.77	308.00
2016	931.88	296.75	412.35	205.28	304.90	318.07
2017	1015.00	314.71	455.28	223.78	313.62	338.41
2018	1042.00	354.35	504.99	244.95	330.91	364.16

Sumber: World Bank, 2019

5. Trade Openness (TO) dalam skala rasio

Negara	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filipina	Singapura
2010	46.70	157.95	127.25	152.22	71.42	369.69
2011	50.18	154.94	139.68	162.92	67.70	379.10
2012	49.58	147.84	138.48	156.55	64.90	369.21
2013	48.64	142.72	133.41	165.09	60.25	367.04
2014	48.08	138.31	131.79	169.54	61.47	360.47
2015	41.94	131.37	125.92	178.77	62.69	329.47
2016	37.42	126.90	122.03	184.69	65.51	304.48
2017	39.36	133.22	122.53	200.39	71.90	317.83
2018	43.02	130.50	123.31	208.31	76.06	326.20

Sumber: World Bank, 2020

LAMPIRAN B

HASIL REGRESI DATA PANEL

1. Model *Common Effect*

Dependent Variable: FDI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/13/20 Time: 03:52
 Sample: 2010 2018
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.971194	0.799842	-4.964973	0.0000
ICT	0.001907	0.002089	0.912667	0.3659
CPI	0.012680	0.002976	4.260811	0.0001
GDP	1.288329	0.197390	6.526810	0.0000
TO	0.519373	0.214480	2.421549	0.0192
R-squared	0.824201	Mean dependent var	1.042906	
Adjusted R-squared	0.809850	S.D. dependent var	0.471532	
S.E. of regression	0.205617	Akaike info criterion	-0.237583	
Sum squared resid	2.071637	Schwarz criterion	-0.053418	
Log likelihood	11.41473	Hannan-Quinn criter.	-0.166557	
F-statistic	57.43191	Durbin-Watson stat	1.698425	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Model Fixed Effect

Dependent Variable: FDI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/13/20 Time: 03:55
 Sample: 2010 2018
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.698978	1.944518	-4.473591	0.0001
ICT	-0.000275	0.004322	-0.063556	0.9496
CPI	0.008405	0.009553	0.879786	0.3838
GDP	2.187345	0.760999	2.874305	0.0062
TO	1.835884	0.786600	2.333947	0.0242

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.866901	Mean dependent var	1.042906
Adjusted R-squared	0.839676	S.D. dependent var	0.471532
S.E. of regression	0.188803	Akaike info criterion	-0.330647
Sum squared resid	1.568453	Schwarz criterion	0.037684
Log likelihood	18.92746	Hannan-Quinn criter.	-0.188596
F-statistic	31.84240	Durbin-Watson stat	2.351905
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.823173	(5,44)	0.0269
Cross-section Chi-square	15.025447	5	0.0103

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: FDI

Method: Panel Least Squares

Date: 05/13/20 Time: 03:56

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.971194	0.799842	-4.964973	0.0000
ICT	0.001907	0.002089	0.912667	0.3659
CPI	0.012680	0.002976	4.260811	0.0001
GDP	1.288329	0.197390	6.526810	0.0000
TO	0.519373	0.214480	2.421549	0.0192

R-squared	0.824201	Mean dependent var	1.042906
Adjusted R-squared	0.809850	S.D. dependent var	0.471532
S.E. of regression	0.205617	Akaike info criterion	-0.237583
Sum squared resid	2.071637	Schwarz criterion	-0.053418
Log likelihood	11.41473	Hannan-Quinn criter.	-0.166557
F-statistic	57.43191	Durbin-Watson stat	1.698425
Prob(F-statistic)	0.000000		

4. Model Random Effect

Dependent Variable: FDI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/13/20 Time: 03:57
 Sample: 2010 2018
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.382653	1.128885	-4.768115	0.0000
ICT	0.002037	0.002312	0.881256	0.3825
CPI	0.008958	0.004145	2.161190	0.0356
GDP	1.605001	0.275558	5.824546	0.0000
TO	0.887752	0.319763	2.776284	0.0078
Random Effect (Cross)				
_IND—C	0.027937			
_MLY—C	-0.042128			
_THA—C	-0.140039			
_VIE—C	0.045875			
_PHI—C	0.087512			
_SNG—C	0.020842			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.106519	0.2414
Idiosyncratic random			0.188803	0.7586
Weighted Statistics				
R-squared	0.655877	Mean dependent var	0.530502	
Adjusted R-squared	0.627786	S.D. dependent var	0.315564	
S.E. of regression	0.192523	Sum squared resid	1.816197	
F-statistic	23.34776	Durbin-Watson stat	1.956564	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.812532	Mean dependent var	1.042906	
Sum squared resid	2.209142	Durbin-Watson stat	1.608545	

5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.949969	4	0.2029

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ICT	-0.000275	0.002037	0.000013	0.5267
CPI	0.008405	0.008958	0.000074	0.9488
GDP	2.187345	1.605001	0.503188	0.4117
TO	1.835884	0.887752	0.516492	0.1871

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: FDI

Method: Panel Least Squares

Date: 05/13/20 Time: 03:59

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.698978	1.944518	-4.473591	0.0001
ICT	-0.000275	0.004322	-0.063556	0.9496
CPI	0.008405	0.009553	0.879786	0.3838
GDP	2.187345	0.760999	2.874305	0.0062
TO	1.835884	0.786600	2.333947	0.0242

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.866901	Mean dependent var	1.042906
Adjusted R-squared	0.839676	S.D. dependent var	0.471532
S.E. of regression	0.188803	Akaike info criterion	-0.330647
Sum squared resid	1.568453	Schwarz criterion	0.037684
Log likelihood	18.92746	Hannan-Quinn criter.	-0.188596
F-statistic	31.84240	Durbin-Watson stat	2.351905
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN C

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Multikolinieritas

	ICT	CPI	GDP	TO
ICT	1.000000	0.732248	-0.354762	0.704046
CPI	0.732248	1.000000	-0.073866	0.720711
GDP	-0.354762	-0.073866	1.000000	-0.576342
TO	0.704046	0.720711	-0.576342	1.000000

2. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/13/20 Time: 04:05
 Sample: 2010 2018
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.976645	0.671704	1.453981	0.1523
ICT	-0.001418	0.001755	-0.808177	0.4229
CPI	-0.002859	0.002499	-1.143744	0.2583
GDP	-0.186860	0.165768	-1.127242	0.2651
TO	-0.023178	0.180119	-0.128680	0.8981

R-squared	0.223256	Mean dependent var	0.256260
Adjusted R-squared	0.159848	S.D. dependent var	0.188388
S.E. of regression	0.172676	Akaike info criterion	-0.586776
Sum squared resid	1.461036	Schwarz criterion	-0.402611
Log likelihood	20.84295	Hannan-Quinn criter.	-0.515751
F-statistic	3.520961	Durbin-Watson stat	2.329522
Prob(F-statistic)	0.013265		

3. Uji Normalitas

